



INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2020



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT





INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2020



INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2020

Disusun oleh :

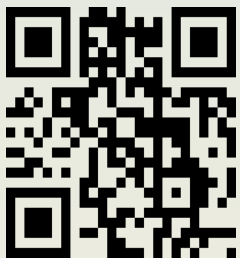
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR

Kontributor :

Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Bina Marga
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Jenderal Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Badan Pusat Statistik

Dokumen dapat diakses melalui :

data.pu.go.id



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 dapat diselesaikan. Adapun buku ini merupakan perwujudan tugas Pusdatin dalam pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen kementerian, dan sebagai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan data, penyajian data dan informasi statistik infrastruktur PUPR dan Sistem Informasi Statistik PUPR.

Sumber data dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data yang disajikan dalam satuan tingkat nasional dengan rincian agregat merupakan provinsi serta analisis statistik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik data dan informasi maupun saran dan arahan yang positif dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran perbaikan dari semua pihak/pembaca senantiasa diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan datang.

Jakarta, November 2020
Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Nazib Faizal

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1



Gambaran Umum Indonesia

Geografi Wilayah	5
Administrasi Wilayah	7
Demografi Wilayah	9
Ekonomi Wilayah	11



APBN PUPR

APBN PUPR	19
-----------	----



Sumber Daya Air

201 Bendungan Eksisting	23
Menatap Jauh Ketahanan Air Indonesia	27
Sebaran Jumlah Danau, Situ dan Embung	29
Wilayah Sungai Strategis Nasional	31



Bina Marga

Kemantapan jalan Nasional	35
Kemantapan Jalan Daerah	36
Kemantapan Jalan untuk Pertumbuhan Ekonomi	37
2100 km Tol Indonesia	39
Tol Dalam Pembangunan dan Perencanaan	41
Kondisi Jembatan Indonesia	43



Cipta Karya

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	47
Tempat Pembuangan Akhir	55
Instalasi Pengolahan Air Limbah	57
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	59
Pengembangan Kawasan Permukiman	61



Perumahan

Hunian Layak untuk Indonesia	79
Rumah Susun	81
Rumah Khusus	83
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	85
Penyaluran KPR-FLPP	87



Bina Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	93
Badan Usaha Jasa Konstruksi	94
Tenaga Kerja Konstruksi	95



Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia PUPR	101
Pengarusutamaan Gender	104
Penutup	107

Data dapat diakses melalui :



data.pu.go.id

Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Program pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pendukung program di sektor lain. Dengan adanya pembangunan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Kementerian PUPR sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakarya, serta perumahan. Proses pembangunan infrastruktur perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program dan pemanfaatan pembangunan. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai unit pengelola dan pelayanan data dan informasi statistik, geospasial tematik, serta audio visual bidang infrastruktur PUPR melalui Bidang Data dan Informasi (BDI). BDI memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dituangkan dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik.

Secara garis besar Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan gambaran tentang hasil pembangunan infrastruktur PUPR yang disajikan melalui infografis disertai dengan analisis statistik. Data tersebut terkait bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, perumahan, serta data sektor pendukung lainnya.

Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini adalah untuk menyajikan data dan informasi statistik terkait bidang infrastruktur PUPR. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR, instansi lainnya, serta masyarakat umum.



GAMBARAN UMUM INDONESIA



Data Dapat Diakses Melalui :



<https://bps.go.id/>

GEOGRAFI WILAYAH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari **34 provinsi** yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Luas wilayah Indonesia yaitu **1.916.906,77 km²**. Secara astronomi Indonesia terletak antara **6° 04' 30"** Lintang Utara dan **11° 00' 36"** Lintang Selatan dan antara **94° 58' 21"** Bujur Timur – **141° 01' 10"** Bujur Timur. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilalui oleh garis khatulistiwa.

Batas-batas negara Indonesia yaitu sebagai berikut :

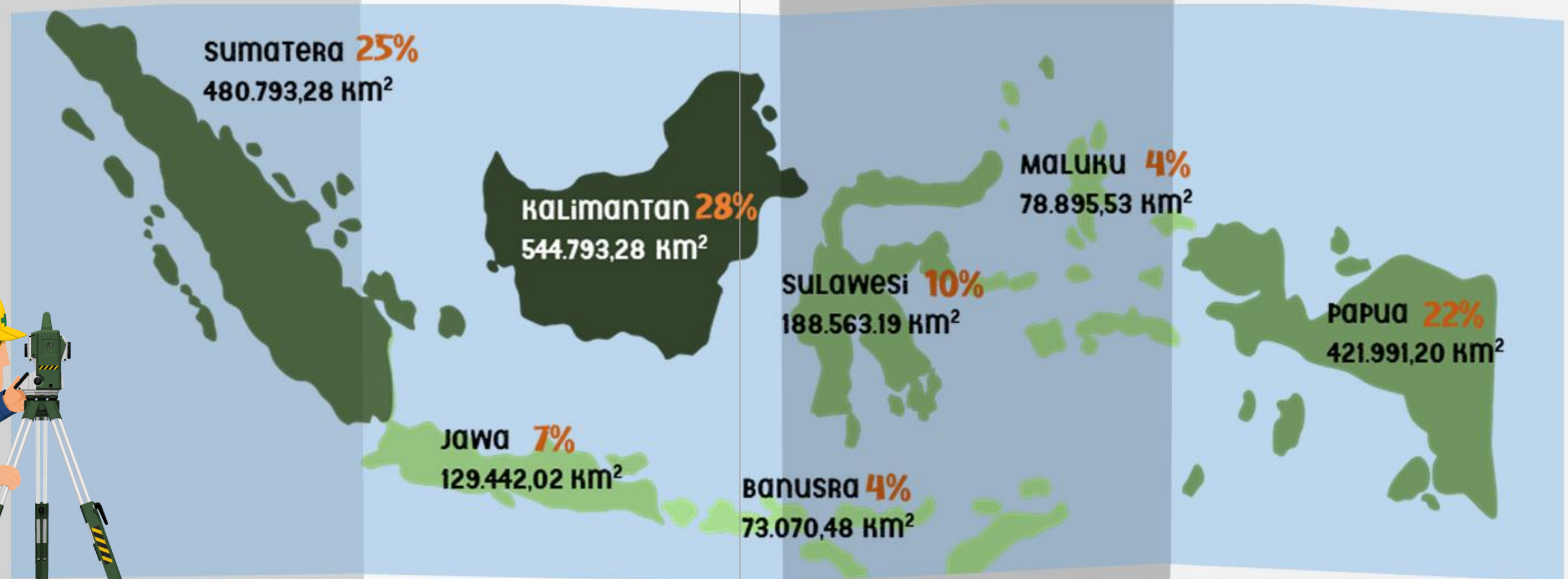
Sebelah Utara : Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan

Sebelah Selatan : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia

Sebelah Barat : Samudera Hindia

Sebelah Timur : Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Persentase luas Pulau Kalimantan sebesar **28,39%** dari luas Indonesia atau seluas **544.150,07 km²**. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau Papua (termasuk negara Papua Nugini). Wilayah terluas berdasarkan provinsi adalah Provinsi Papua, dengan luas wilayah **319.036,05 km²** atau sebesar **16,64%**. Sedangkan provinsi yang memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu Provinsi Papua Barat sebanyak **4.108** pulau.

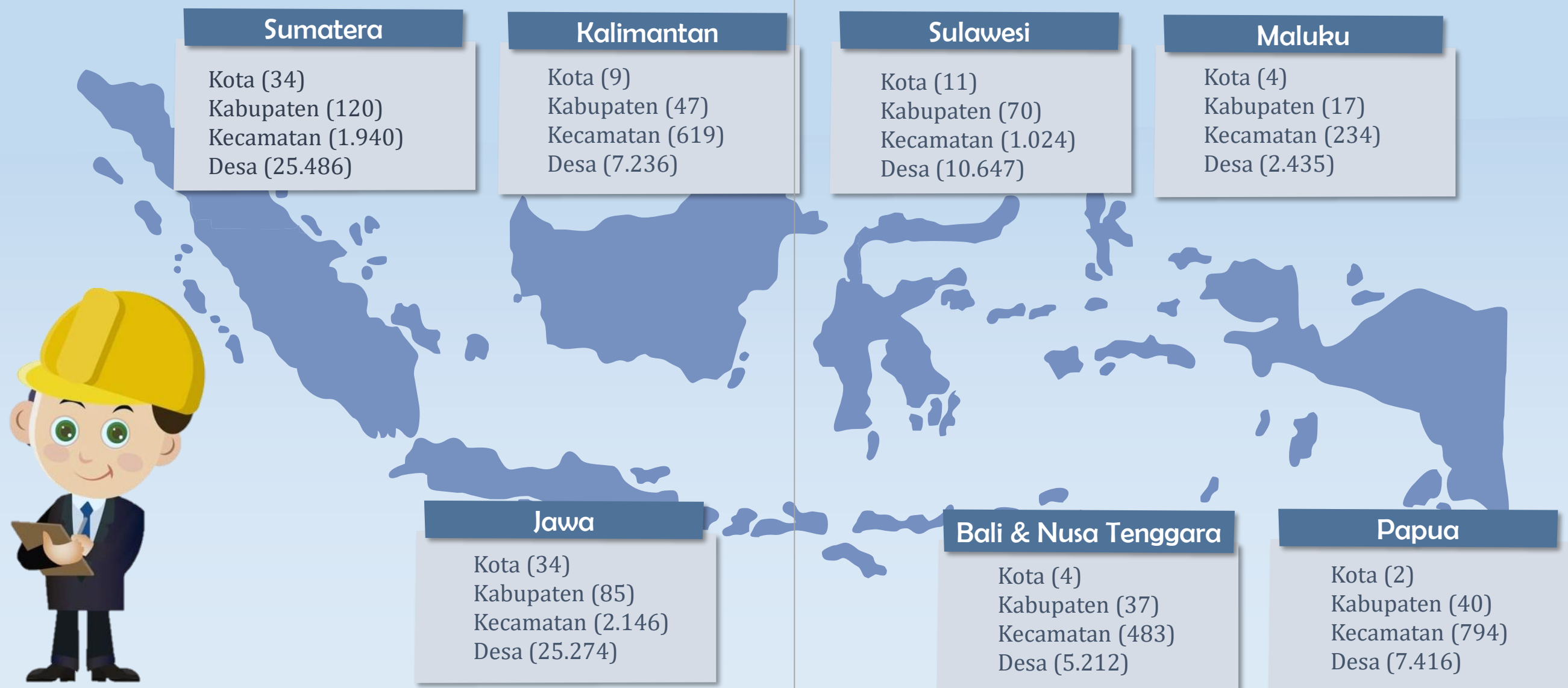


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Statistik Indonesia 2020

ADMINISTRASI WILAYAH

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia adalah presidensial dengan presiden sebagai kepala negara. Indonesia memiliki 34 provinsi, setelah Kalimantan Utara ditetapkan menjadi provinsi pada tahun 2012.

Tahun 2019 Indonesia tercatat memiliki **416 kabupaten** dan **98 kota**. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak **29 kabupaten**. Provinsi yang memiliki kota terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, masing-masing sebanyak **9 kota**. Jumlah kecamatan dan desa di Indonesia sejak tahun 2015-2019 selalu bertambah dan pada tahun 2019 terdapat **7.246 kecamatan** dan **83.813 desa**.





Indonesia merupakan negara majemuk. Sebagai negara kesatuan kemajemukan tak lantas membuat Indonesia menjadi terkotak-kotak. Sebagai mana semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam namun tetap satu. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang dimiliki Indonesia.

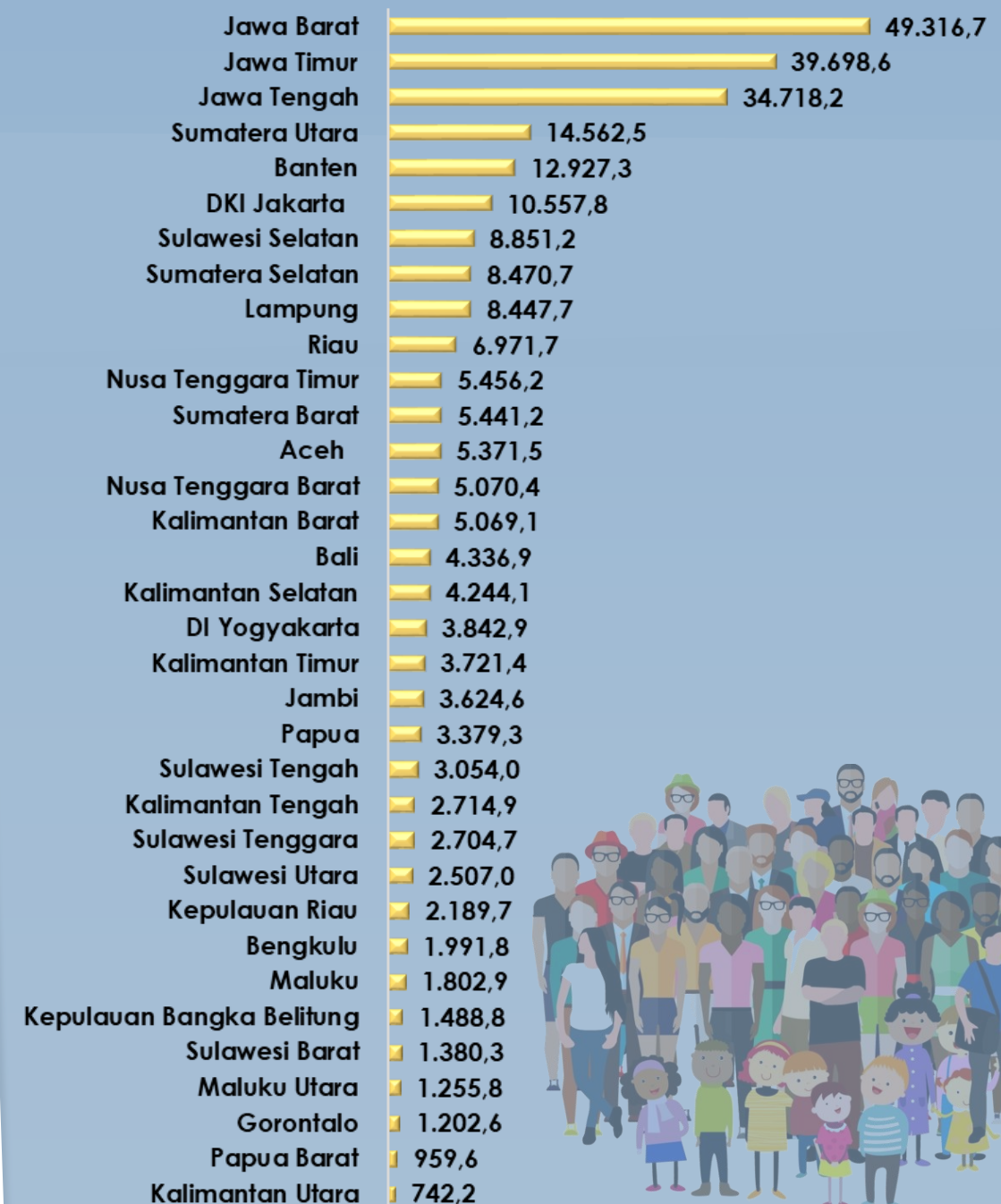
Menurut data BPS terdapat sekitar 1.300 suku bangsa di Indonesia. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, dengan jumlah populasinya sebanyak 95,2 juta jiwa atau sebesar 40% dari populasi Indonesia. Terdapat sebanyak 2.500 bahasa daerah yang digunakan di Indonesia, jumlah ini melebihi jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 (bulan Mei) adalah 237.641,3 ribu jiwa. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 adalah 268.074,6 ribu jiwa. Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 49.316,7 ribu jiwa, diikuti dengan Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 39.698,6 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2019 adalah sebesar 1,31%.

Sumber : BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, Statistik Indonesia 2020

Sebaran penduduk di Indonesia tidak merata di tiap pulau dan provinsi. Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebesar 56,46% dari total jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 151.061,5 jiwa menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa dapat terlihat dari angka kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 yang mencapai 15.900 jiwa/km², angka ini merupakan yang terbesar di Indonesia.

Jumlah Penduduk Tahun 2019



EKONOMI WILAYAH

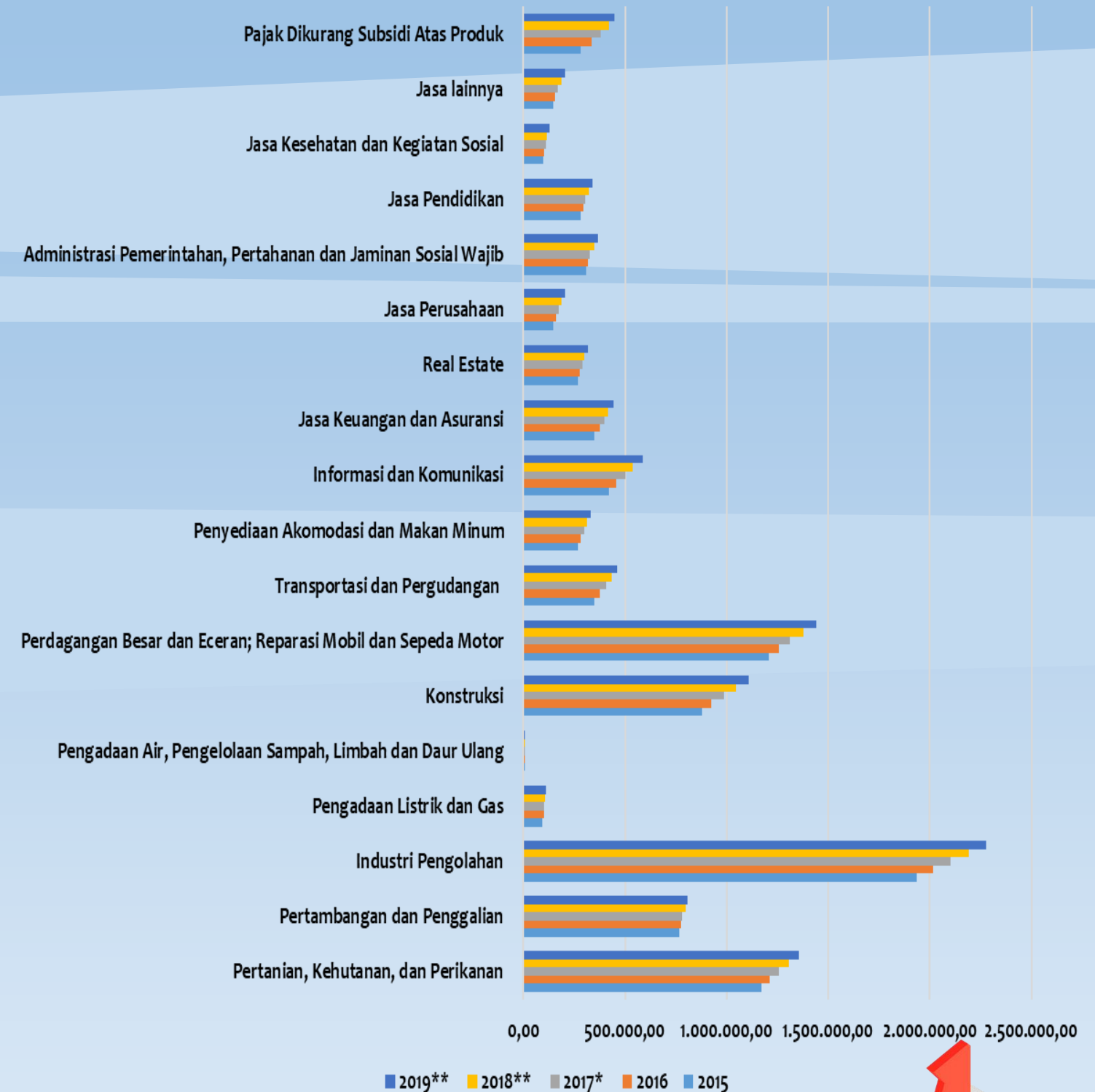


Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu, sedangkan pada tingkat regional (provinsi) kondisi ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDB dan PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDB merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut.

Perhitungan nilai PDB dan PDRB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu yang kemudian dijadikan dasar. PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada tahun tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dapat dilihat dari nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan.

Industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan nilai PDB atas dasar harga konstan paling tinggi sejak tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yaitu 21,38% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau sebesar 2.016.876,90 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat menjadi 2.276.682,80 miliar rupiah pada tahun 2019 atau sebesar 20,79%. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor tertinggi kedua dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016-2019 yaitu 1.440.523,20 miliar rupiah atau sebesar 13,16%.

PDB atas Dasar Harga Konstan



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya, Statistik Indonesia 2020

Catatan:

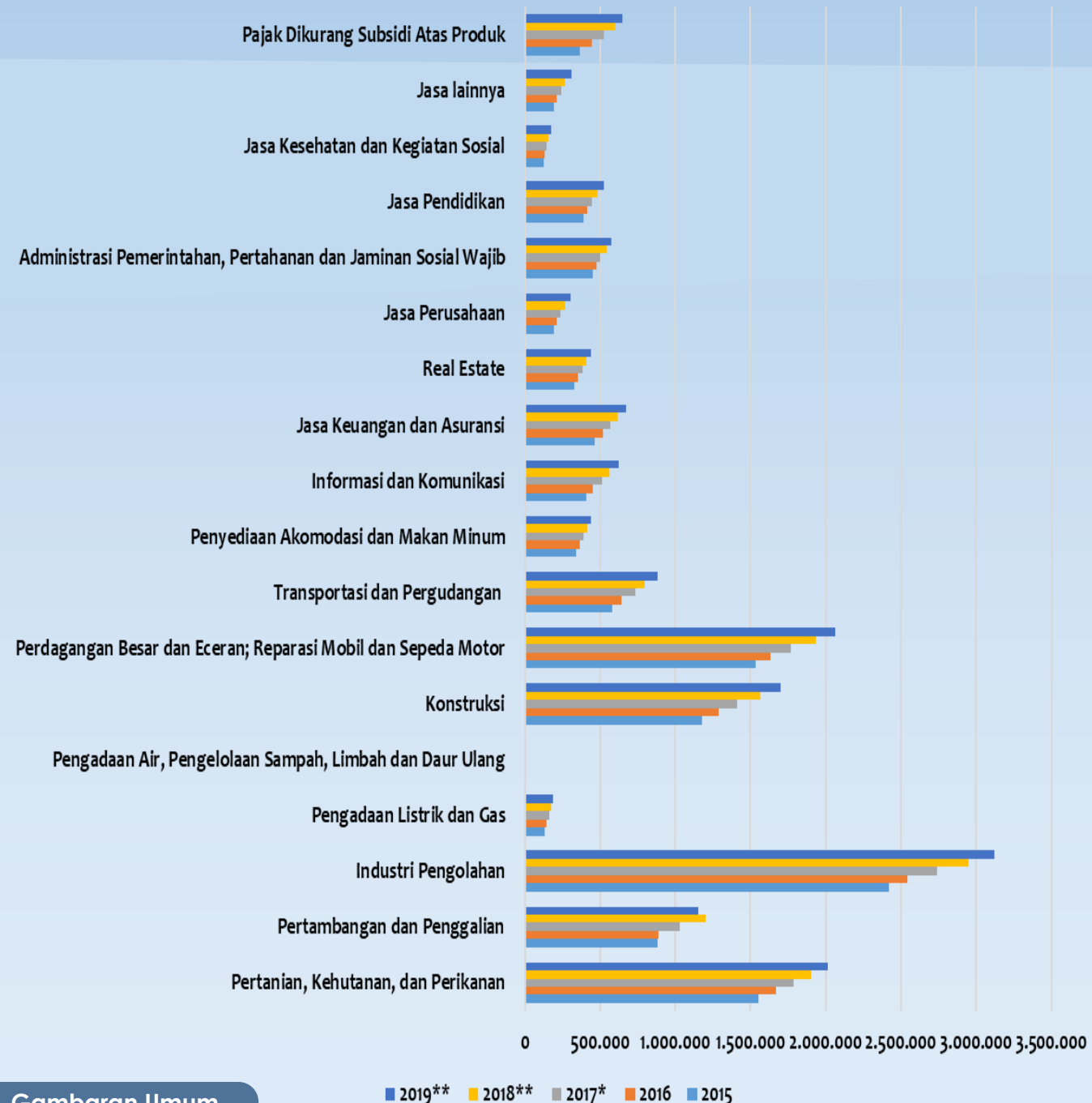
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Dalam periode empat tahun, lapangan usaha pada sektor industri pengolahan memiliki nilai PDB atas dasar harga berlaku tertinggi. Pada tahun 2016 nilai PDB atas dasar harga berlaku pada lapangan usaha sektor industri pengolahan sebesar 2.545.203,60 miliar rupiah atau sebesar 20,52% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 3.119.617,30 miliar rupiah atau sebesar 19,70%. Sektor kedua yang berkontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional yaitu lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu 2.013.626,90 miliar rupiah atau sebesar 12,81%

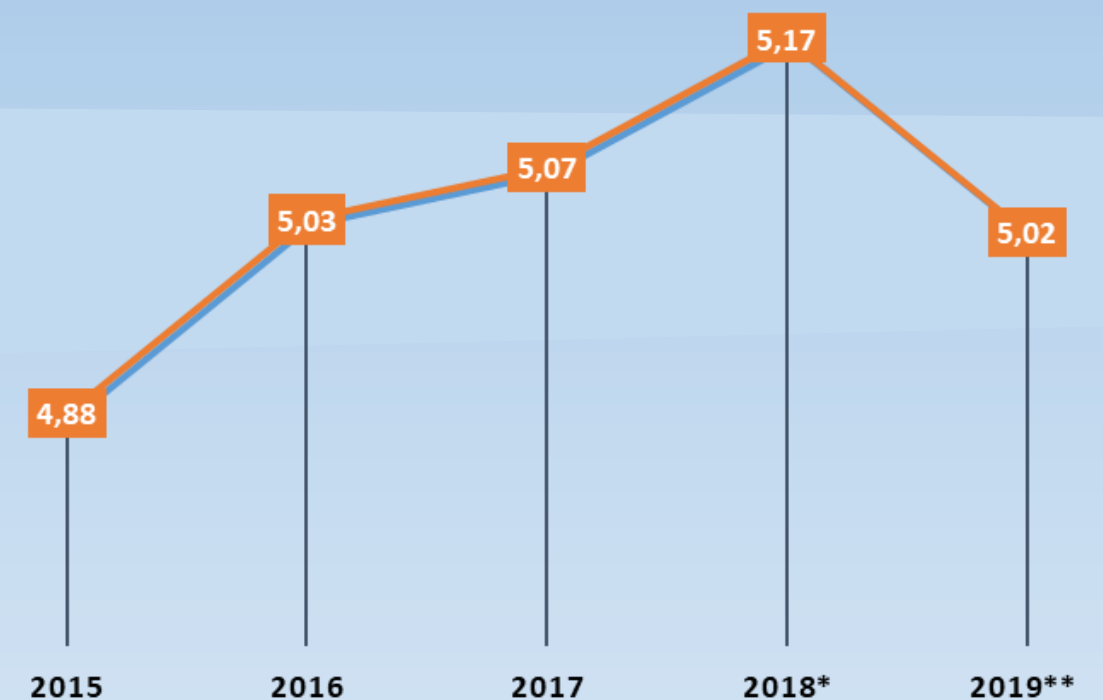
PDB atas Dasar Harga Berlaku



■ 2019** ■ 2018** ■ 2017* ■ 2016 ■ 2015

Laju pertumbuhan PDB dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil, dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan, dasar pembuatan prakiraan bisnis khususnya persamaan penjualan. Perkembangan laju pertumbuhan kumulatif PDB Indonesia sangat fluktuatif, dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan. Sedangkan pada tahun 2019 laju pertumbuhan kumulatif PDB mengalami penurunan menjadi 5,02%.

Laju Pertumbuhan PDB



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya, Statistik Indonesia 2020

Catatan:

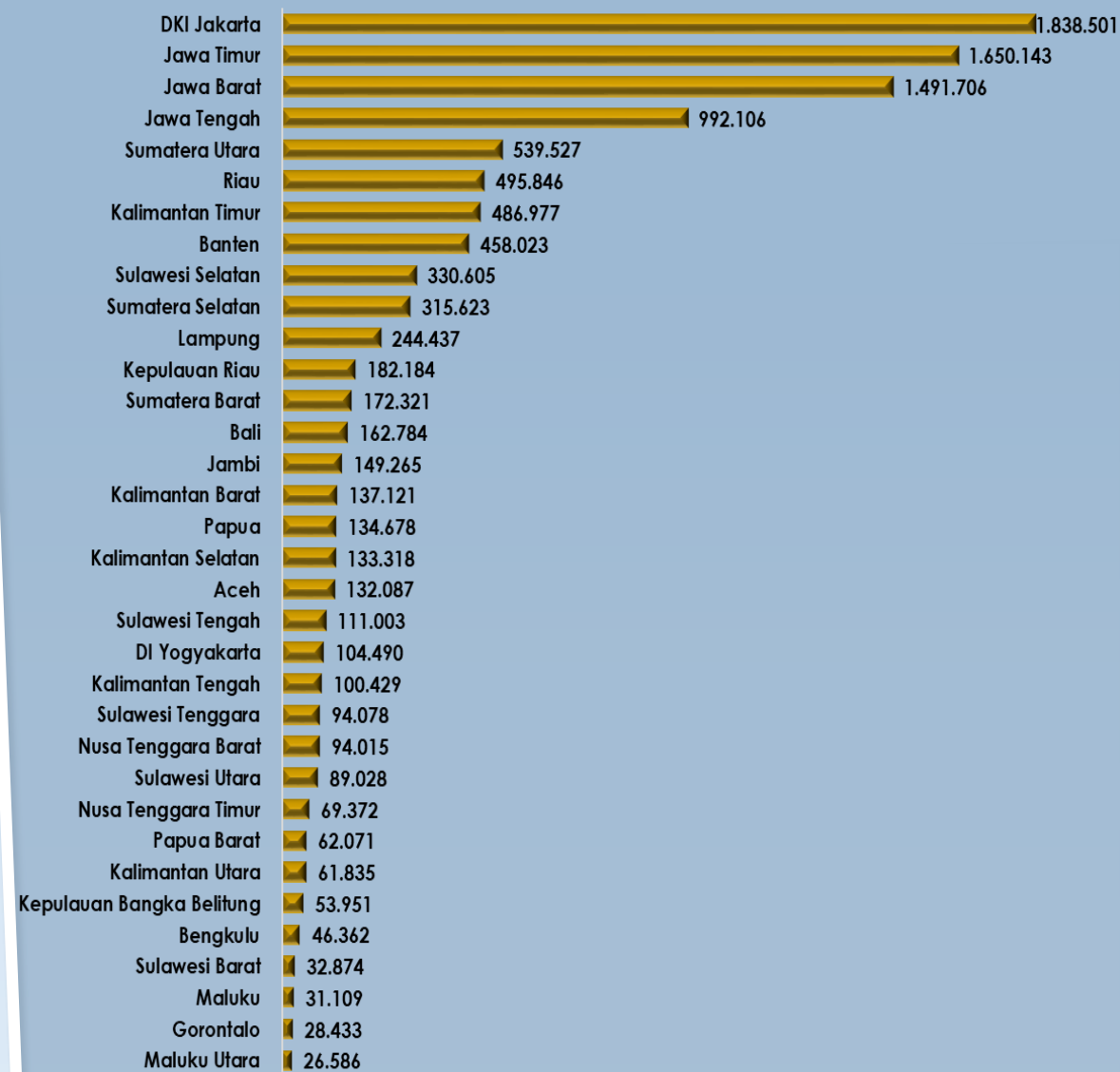
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



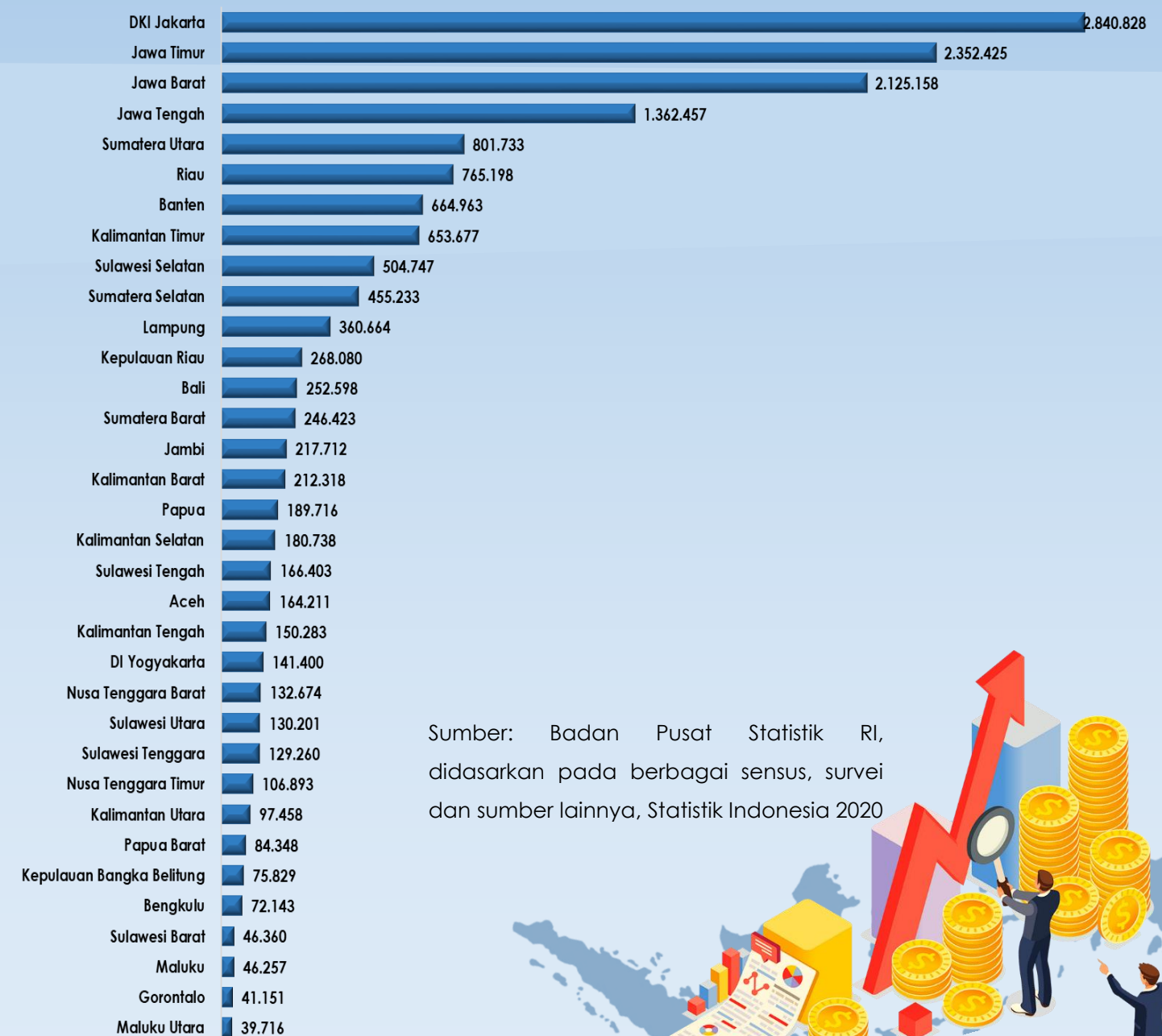
Indikator ekonomi makro di suatu provinsi salah satunya adalah PDRB. PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dalam lingkup provinsi. Berdasarkan pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Pada tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku yang paling tinggi yaitu 1.838.501 miliar rupiah dan 2.840.828 miliar rupiah. Nilai PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku terendah adalah Provinsi Maluku Utara, masing-masing sebesar 26.586 miliar rupiah dan 39.716 miliar rupiah.

PDB Harga Konstan Berdasarkan Provinsi



Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan tahun 2015 mencapai 4,99% meningkat menjadi 5,32% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 5%. Provinsi Lampung dan Provinsi DI Yogyakarta mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB tiap tahunnya. Sedangkan yang mengalami fluktuasi ekstrim adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Papua.

PDB Harga Berlaku Berdasarkan Provinsi



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya, Statistik Indonesia 2020



APBN PUPR

Data Dapat Diakses Melalui :



https://data.pu.go.id/search/field_topic/apbn-3



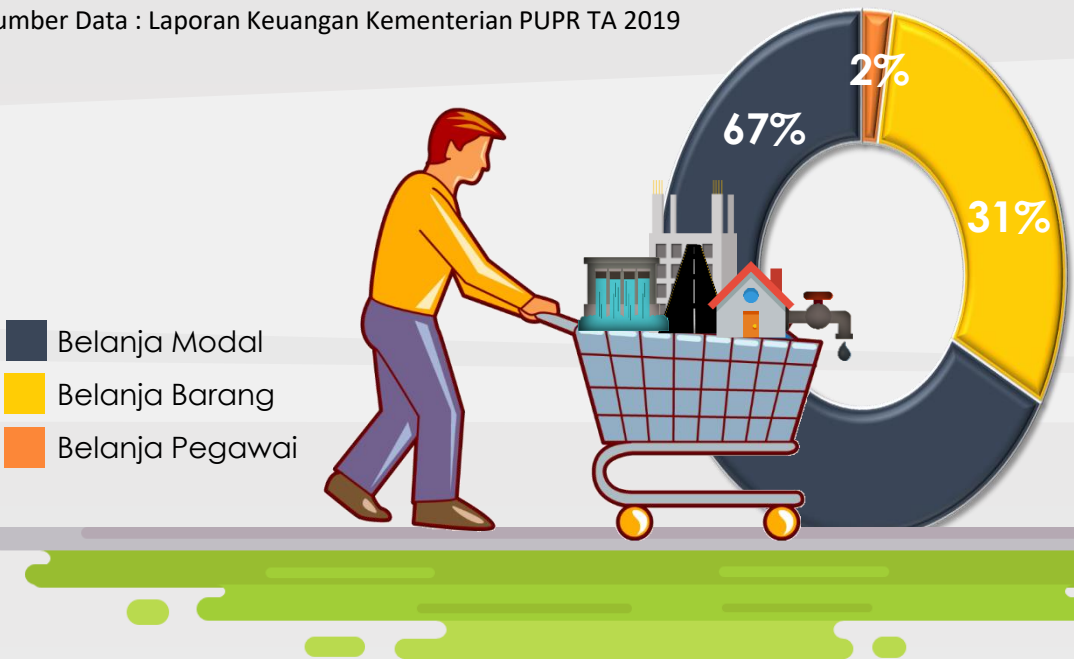
Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan pengalokasian anggaran untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian lembaga yang menerima alokasi APBN terbesar. Pada tahun 2019 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar 121.943,33 miliar rupiah. Besarnya anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR digunakan untuk menjalankan program pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan permukiman serta program pembangunan infrastruktur lainnya.



Berdasarkan jenis belanja APBN dibagi menjadi 3 yaitu belanja pegawai, barang, dan modal. Persentase terbesar pengalokasian APBN adalah belanja modal yaitu sebesar 67,02% atau senilai 64.937,9 miliar rupiah. Belanja barang memiliki persentase sebesar 30,54% atau senilai 32.760,9 miliar rupiah, dan sebesar 2,45% dialokasikan untuk belanja pegawai senilai 2.849,5 miliar rupiah.

Status Data : Tahun 2020
Sumber Data : Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2019



Berdasarkan jenis program, APBN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2019 dialokasi untuk 13 jenis program. Anggaran terbesar dialokasikan untuk program penyelenggaraan jalan yaitu senilai 46.008,4 miliar rupiah atau sebesar 37,73% dan tertinggi kedua dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya air yaitu senilai 40.657,8 miliar rupiah atau sebesar 33,43%.

NO	PROGRAM	APBN
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tuga Teknis Lainnya Kementerian PUPR	288.166.730.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	255.700.000.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	104.292.000.000
4	Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR	550.601.235.000
5	Program Pembinaan Konstruksi	594.305.997.000
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	23.356.866.086.000
7	Penyelenggaraan Jalan	46.008.441.102.000
8	Pengelolaan Sumber Daya Air	40.657.879.858.000
9	Program Pengembangan Perumahan	8.464.107.590.000
10	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	485.430.539.000
11	Pengembangan Infrastruktur Wilayah	296.053.569.000
12	Pengembangan Sumber Daya Manusia	456.489.248.000
13	Pengendalian Lumpur Sidoarjo	425.000.000.000
TOTAL BELANJA		121.943.333.954.000

SUMBER DAYA AIR



Data Dapat Diakses Melalui :



<https://data.pu.go.id/group/sda>

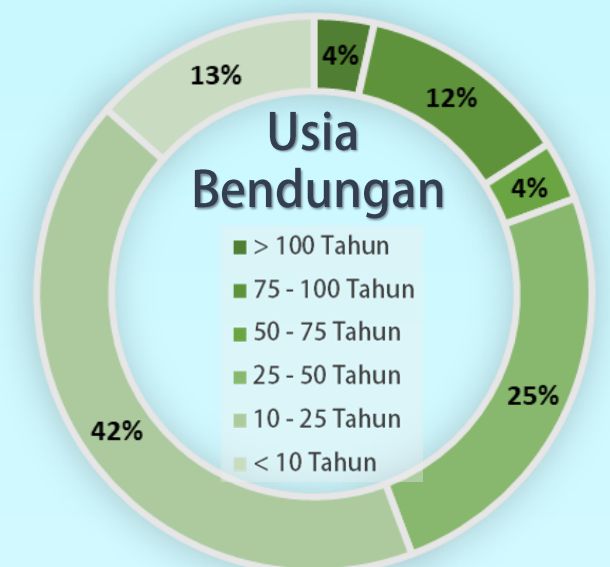


201 BENDUNGAN EKSISTING DI INDONESIA

Status Data : 13 Januari 2020

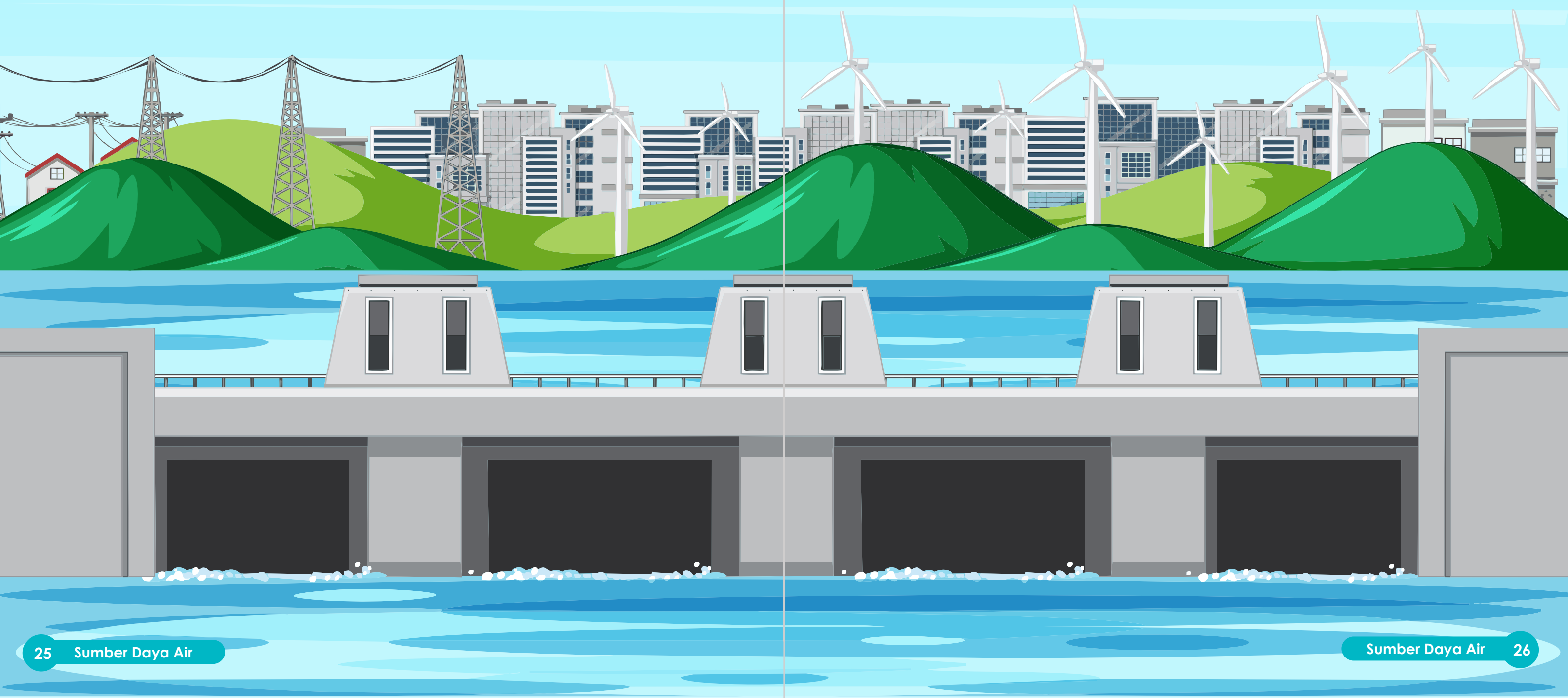
Sumber Data :

- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal sumber Daya Air

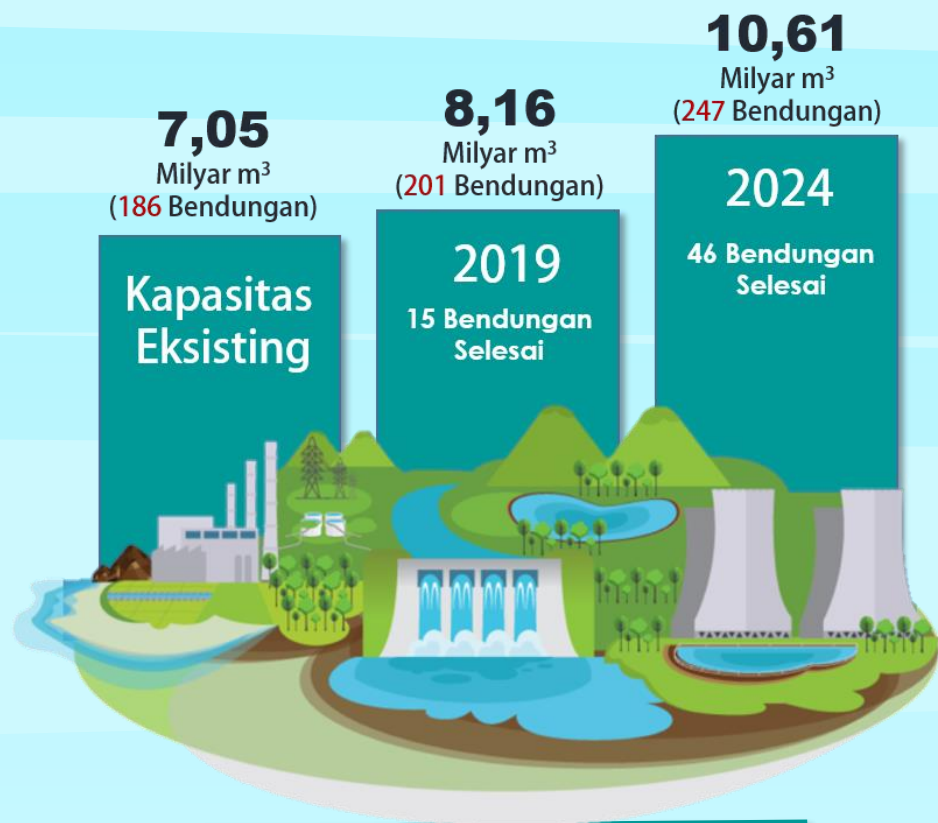


Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, yaitu bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sedangkan waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan antara lain adalah untuk meningkatkan manfaat serta fungsi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (tailing) atau tampungan lumpur.

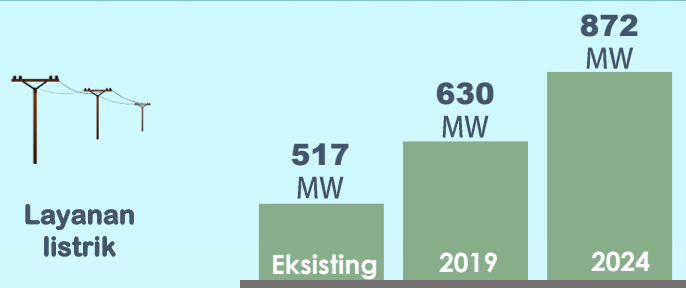
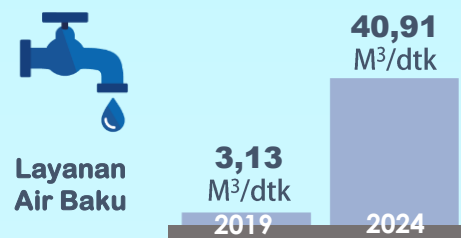
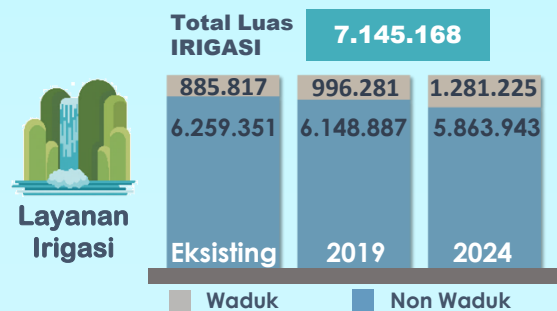
Tak hanya itu bendungan juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan tempat berwisata. Manfaat pembangunan bendungan ada dua yaitu single purpose dam dan multi purpose dam. Single purpose dam merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. Multi purpose dam dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Hal penting dalam pemeliharaan bendungan adalah ketersediaan air, bendungan dibangun untuk membendung air sungai sebagai cadangan air. Penanggung jawab pembangunan serta pemeliharaan bendungan adalah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, atau badan usaha.



MENATAP JAUH KETAHANAN AIR INDONESIA



PEMANFAATAN BENDUNGAN



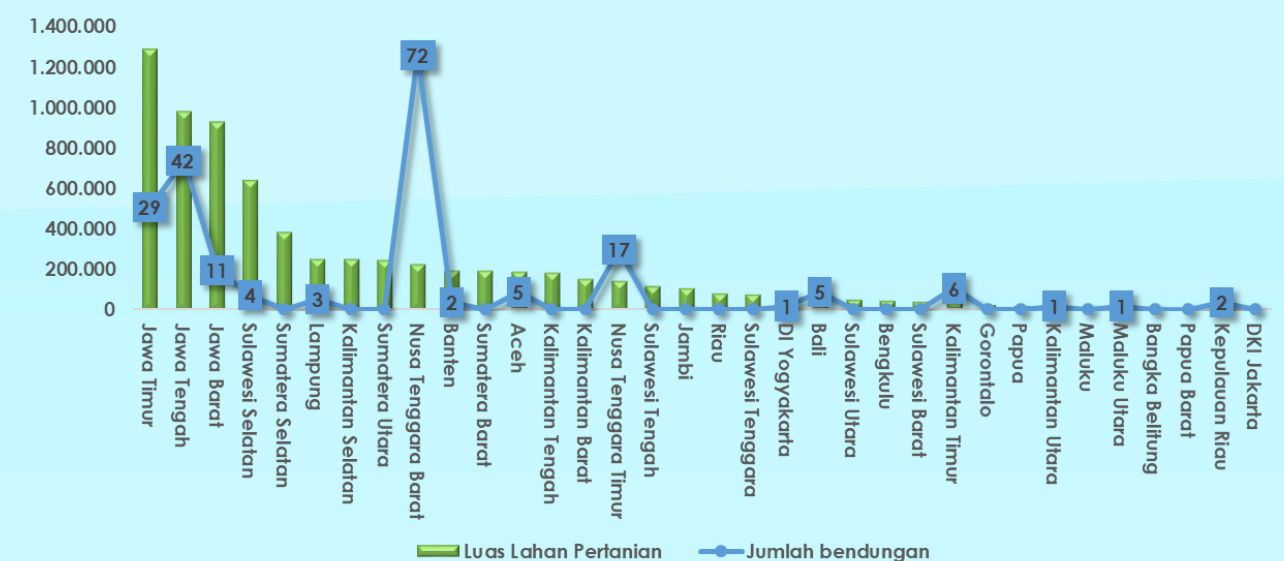
Ketersediaan infrastruktur pendukung ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan daya asing. Untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membangun 61 Bendungan pada 2014-2019 dan telah selesai 15 Bendungan pada tahun 2019.

Penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang diairi. Saat ini dari 7,1 juta Ha sawah, sebanyak 996.281 hektar sawah atau 14,02 persen dari irigasi yang sumber airnya berasal dari bendungan, sementara sisanya masih berasal dari air non bendungan seperti tadah hujan maupun bendung saja.

Dengan selesainya 61 Bendungan tersebut, luasan sawah yang mendapat air dari bendungan bertambah 395.408 Ha atau secara total menjadi 1,28 juta Ha atau 18,03 persen yang bersumber dari air bendungan. Dengan sumber air dari bendungan, maka kebutuhan air pertanian diharapkan bisa terpenuhi sepanjang tahun.

Berikut ini adalah grafik sebaran jumlah bendungan dan luasan areal sawah pada tiap provinsi.

Luas Areal Sawah vs Jumlah Bendungan



Dari Grafik tersebut dapat dilihat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah bendungan paling banyak, namun lahan pertaniannya tidak begitu luas. Banyak pembangunan bendungan di Provinsi ini dikarenakan Nusa Tenggara Barat merupakan daerah terkering di Indonesia, hanya mengalami musim hujan selama 3 bulan. sehingga membutuhkan banyak tampungan air untuk mempertahankan ketersediaan air saat musim kemarau.

Status Data : 13 Januari 2020

Sumber Data :

- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal sumber Daya Air
- Buku Statistik Lahan Pertanian Tahun 2019

SEBARAN JUMLAH DANAU, SITU DAN EMBUNG

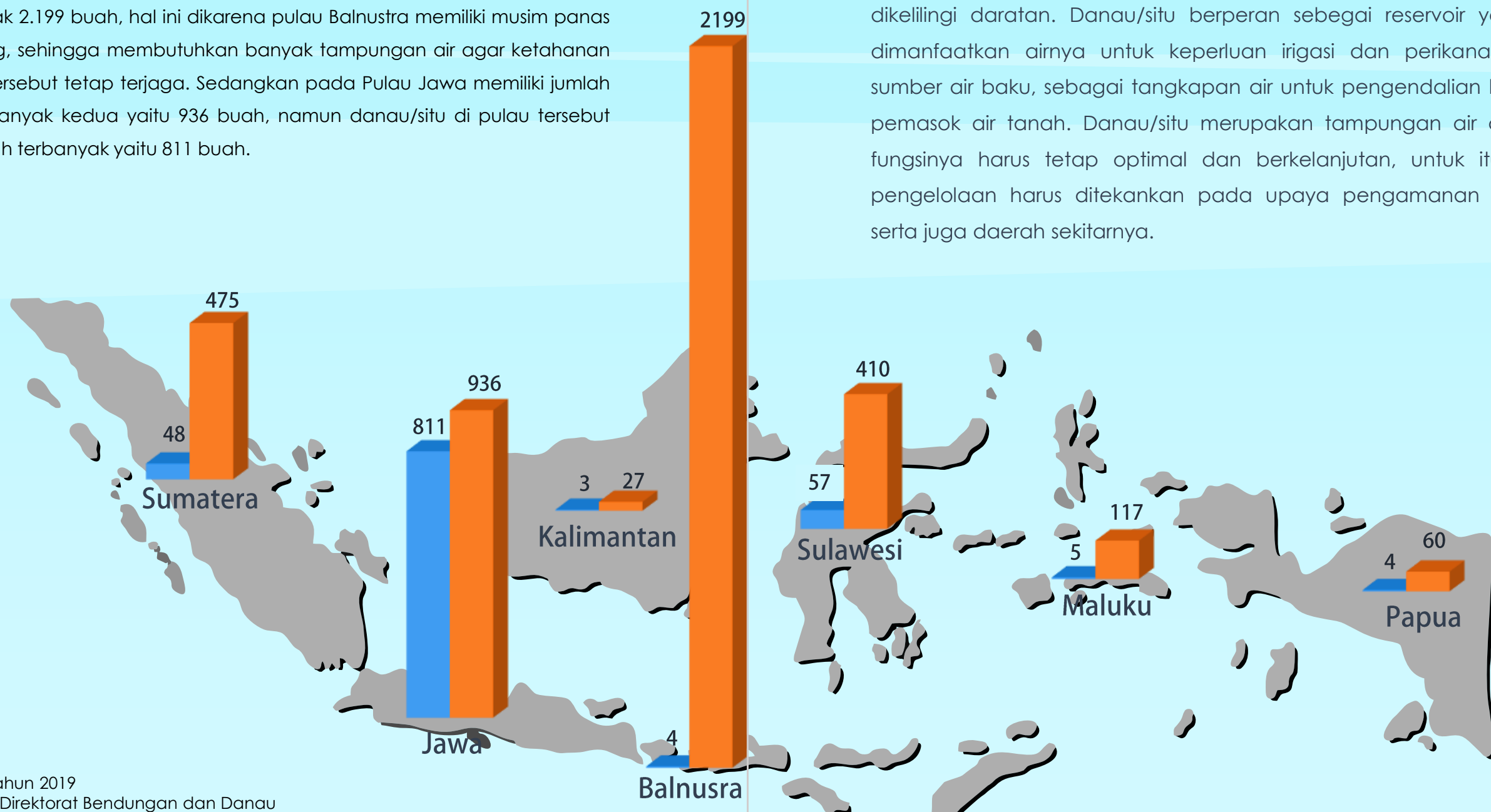
**Total Jumlah
Danau & Situ** **932**

**Total Jumlah
Embung** **4.224** **Volume Tampungan**
313,84 m³

Jumlah Embung terbanyak berada di Pulau Balnustra (Bali – Nusa Tenggara) yaitu sebanyak 2.199 buah, hal ini dikarena pulau Balnustra memiliki musim panas yang panjang, sehingga membutuhkan banyak tampungan air agar ketahanan air di pulau tersebut tetap terjaga. Sedangkan pada Pulau Jawa memiliki jumlah embung terbanyak kedua yaitu 936 buah, namun danau/situ di pulau tersebut memiliki jumlah terbanyak yaitu 811 buah.

Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan air limbah. Air hujan yang ditampung dipergunakan pada saat musim kemarau. Sedangkan embung potensi adalah titik-titik yang memungkinkan bagi pembangunan embung atau bangunan konservasi air buatan, seperti bendungan atau waduk. Selain sebagai tempat penampungan air embung juga memiliki fungsi sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan disekitarnya.

Danau/situ merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air, baik air asin maupun air tawar dan cekungan tersebut dikelilingi daratan. Danau/situ berperan sebagai reservoir yang dapat dimanfaatkan airnya untuk keperluan irigasi dan perikanan, sebagai sumber air baku, sebagai tangkapan air untuk pengendalian banjir, serta pemasok air tanah. Danau/situ merupakan tampungan air alami yang fungsinya harus tetap optimal dan berkelanjutan, untuk itu kegiatan pengelolaan harus ditekankan pada upaya pengamanan danau/situ, serta juga daerah sekitarnya.



Status Data : Tahun 2019
Sumber Data : Direktorat Bendungan dan Danau

WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dijelaskan bahwa wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Sedangkan daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Nama Wilayah Sungai	Provinsi
Aceh - Meureudu	Aceh
Woyla - Bateue	Aceh
Jambo Aye	Aceh
Belawan - Ular - Padang	Sumatera Utara
Toba - Asahan	Sumatera Utara
Siak	Riau
Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
Bangka	Kepulauan Bangka Belitung
Seputih - Sekampung	Lampung
Citarum *	Jawa Barat
Serayu - Bogowonto	Jawa Tengah
Jratunseluna	Jawa Tengah
Brantas	Jawa Timur
Lombok	Nusa Tenggara Barat
Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
Flores	Nusa Tenggara Timur
Kapuas	Kalimantan Barat
Mentaya - Katingan	Kalimantan Tengah
Tondano - Sangihe - Talaud - Miangas	Sulawesi Utara
Paguyaman	Gorontalo
Walanae - Cenranae	Sulawesi Selatan
Jeneberang	Sulawesi Selatan
Halmahera Utara	Maluku Utara
Halmahera Selatan	Maluku Utara
Ambon - Seram	Maluku
Kepulauan Yamdena - Wetar	Maluku
Bali - Penida	Bali
Kamundan - Sebyar	Papua Barat

Sumber : Lampiran I.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

BINA MARGA

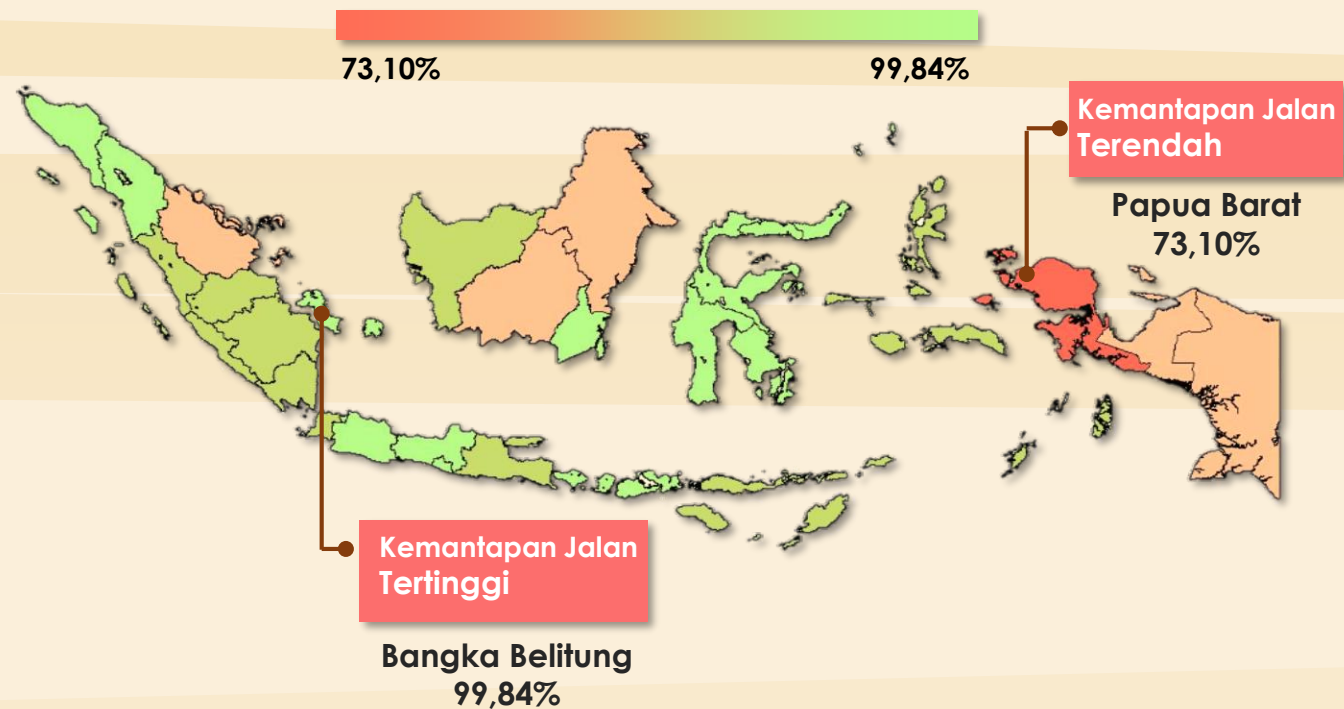


Data Dapat Diakses Melalui :



<https://data.pu.go.id/group/bina-marga>

Kemantapan Jalan Nasional



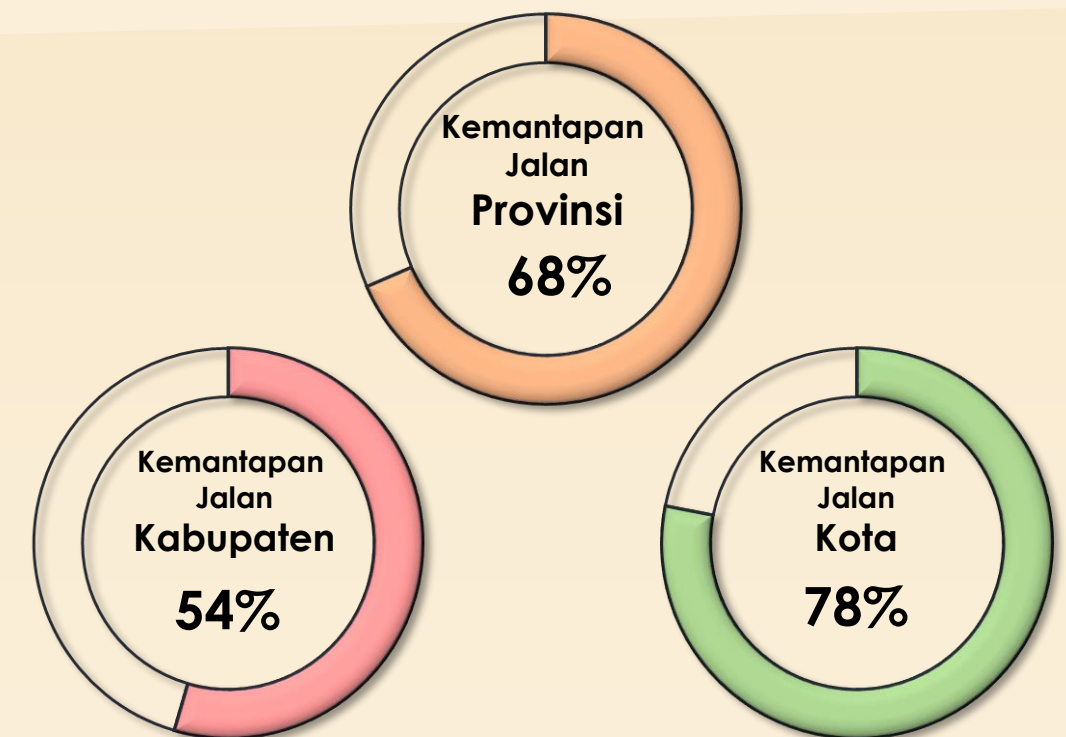
Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Wewenang penyelenggaraan jalan nasional berada pada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Kondisi Jalan Nasional di Indonesia secara umum dalam kondisi mantap dengan persentase 92,81%. Provinsi dengan persentase jalan mantap terbesar adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 99,84%. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 73,10%.

Kemantapan Jalan Daerah

Jalan daerah merupakan jalan yang kewenangan pembinaannya berada di tangan pemerintah daerah. Jalan daerah antara lain jalan provinsi, jalan kota dan jalan kabupaten. Peran Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga selaku penyelenggara jalan adalah memberikan fasilitas kepada penyelenggara jalan daerah berupa sosialisasi, pelatihan, serta bantuan pendanaan. Pengumpulan data jalan daerah dilakukan terkait dengan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara umum kondisi kemantapan jalan di Indonesia dalam keadaan baik. Secara agregat 68% atau 32.790,18 km jalan provinsi dalam kondisi mantap, jalan kabupaten sebesar 54% atau 211.644,08 km dalam kondisi mantap, sedangkan jalan kota dengan kondisi mantap sebesar 78% atau 35.241,40 km.



Status Data : Tahun 2019
 Sumber : Sub Direktorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga

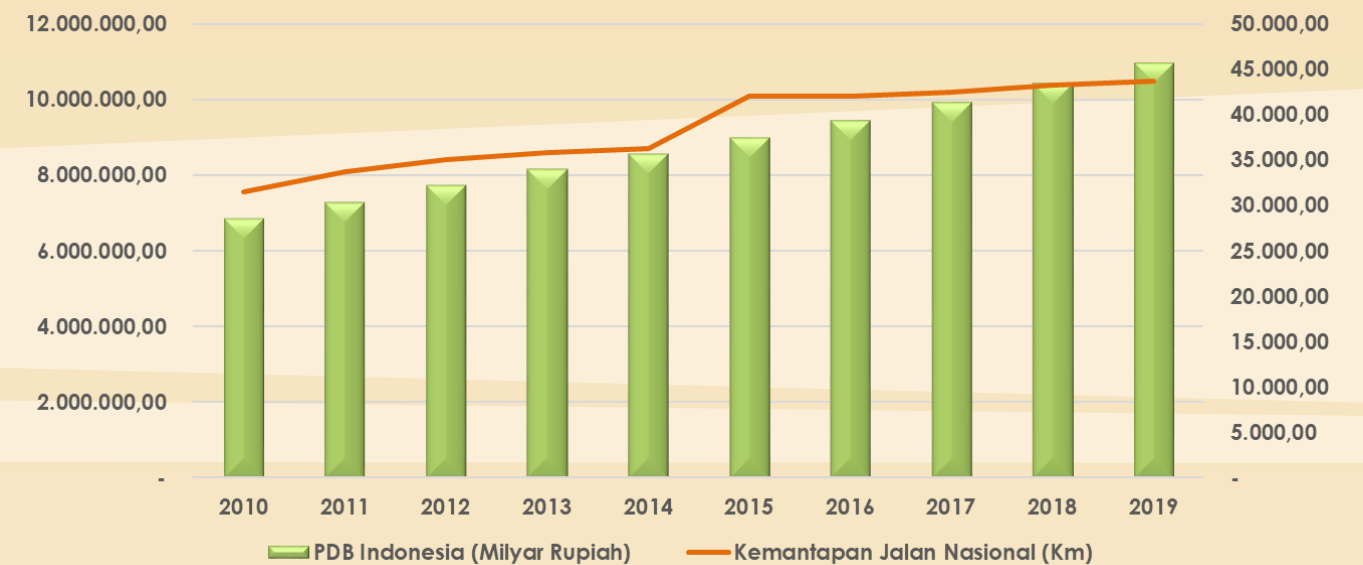
Kemantapan Jalan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antar wilayah, pemerintah telah menetapkan target pembangunan infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan sangat berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional, serta penghubung antar daerah sebagaimana kondisi geografis Indonesia.

Selain itu, infrastruktur jalan dapat menopang sektor transportasi yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia, aksesibilitas antar wilayah, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Studi menunjukkan, jika hendak memakmurkan rakyat dan menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki jalur distribusi, dan jalur distribusi utama adalah jalan. Karena itu kualitas jalan adalah kualitas perekonomian bangsa.

Berikut adalah analisis pengaruh kemantapan jalan nasional (Km) terhadap Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha) atas Dasar Harga Konstan



Berdasarkan data BPS (2010-2019) menunjukkan nilai PDB yang meningkat setiap tahunnya. Rata – rata kenaikan setiap tahun 5,33% atau sebesar 453.901,18 Milyar Rupiah. Pada setiap peningkatan disebabkan oleh 9,99% dari sektor konstruksi. Salah satu konstruksi yang paling berpengaruh adalah pembangunan jalan nasional. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian antar provinsi di Indonesia. Kualitas jalan yang baik memberikan keunggulan bagi sebuah negara maupun daerah untuk bersaing secara kompetitif dalam memasarkan hasil produknya, mengembangkan industrinya, mendistribusikan populasi serta meningkatkan pendapatan.

2.100 KM TOL INDONESIA

1978-1998
(20 Tahun)

561 KM

Trans Sulawesi	6 km
Trans Sumatera	43 km
Non Trans Jawa	85 km
Jabodetabek	138 km
Trans Jawa	289 km

1999-2004
(5 Tahun)

13 KM

Jabodetabek	13 km
-------------	-------

1%

15%

54%

2005-2014
(9 Tahun)

228 KM

Trans Sulawesi	12 km
Trans Jawa	63 km
Jabodetabek	67 km
Non Trans Jawa	77 km

2015-2019
(4 Tahun)

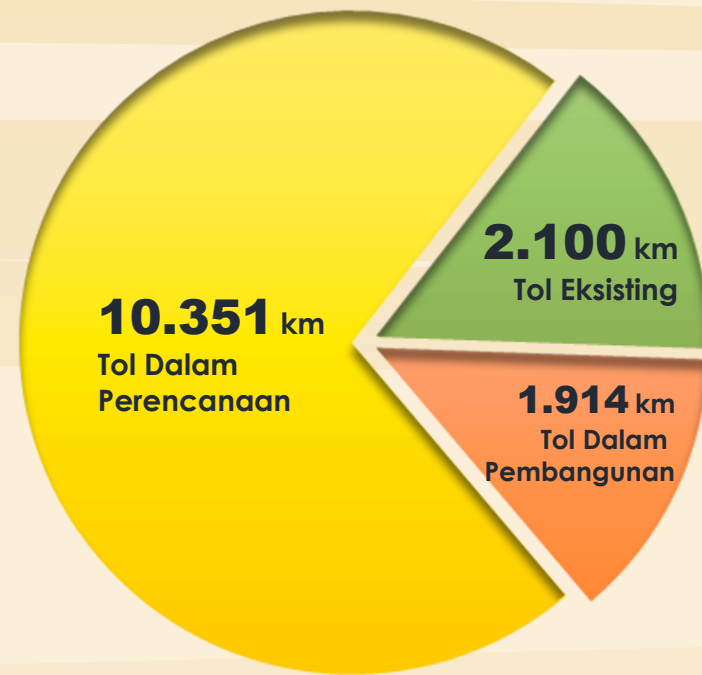
1.298 KM

Jabodetabek	43 km
Kalimantan	65 km
Non Trans Jawa	77 km
Trans Sumatera	427 km
Trans Jawa	705 km

Status Data : Tahun 2019
Sumber : Sub Direktorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga



TOL DALAM PEMBANGUNAN & PERENCANAAN

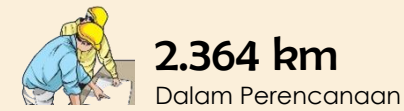


Status Data : Tahun 2019
 Sumber : Sub Direktorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan,
 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga

Trans Sumatera



Kalimantan



Sulawesi



Jabodetabek



Trans Jawa



Bali-Nusra



Non Trans Jawa



KONDISI JEMBATAN DI INDONESIA

**Total Jumlah
Jembatan
Di Indonesia** **18.648**
510.366 km

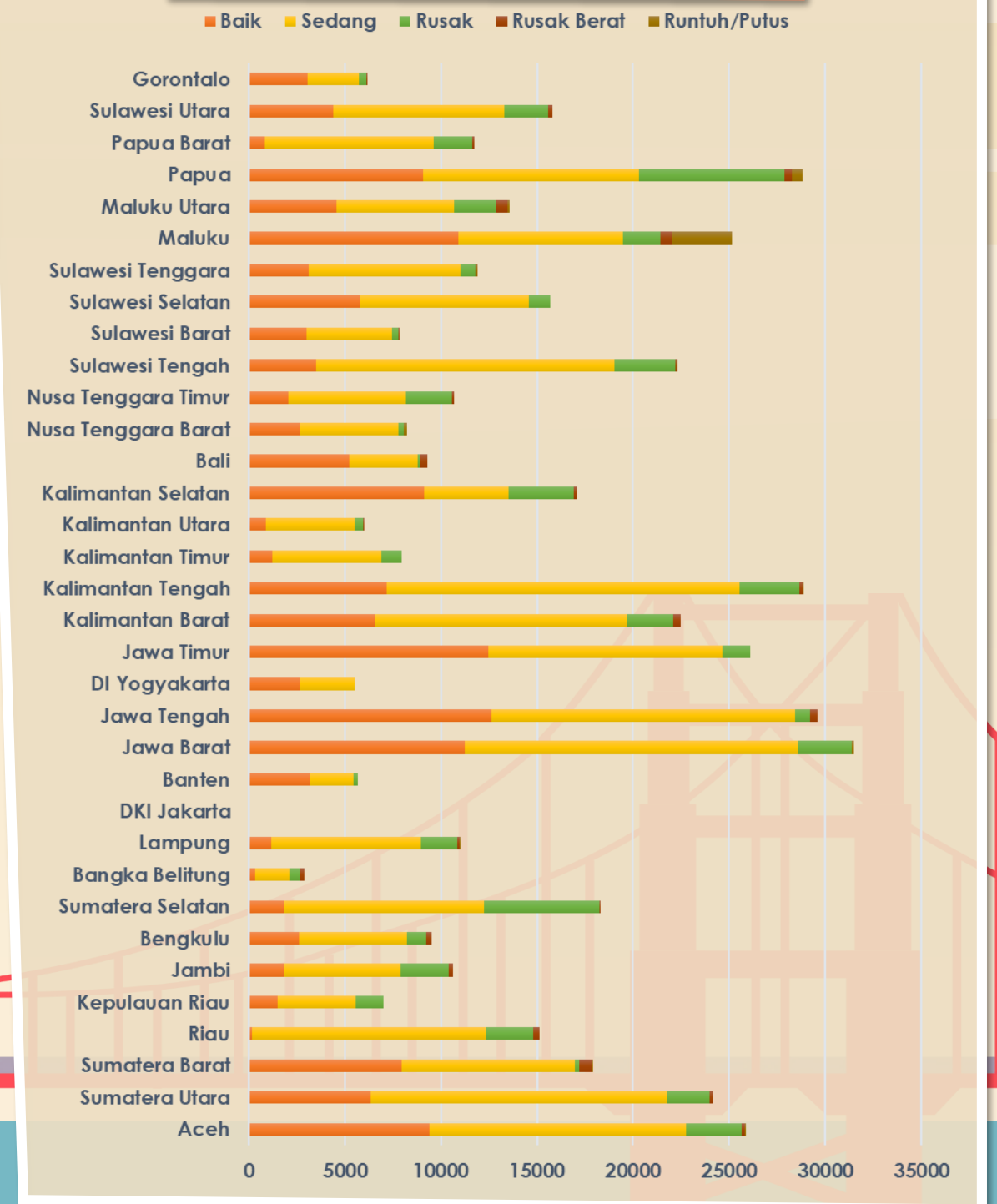


Status Data : Tahun 2019
Sumber : Sub Direktorat Data dan Pengembangan
Sistem Informasi Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina
Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina
Marga

Jembatan merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan tempat yang pisah karena kondisi geografis.

Pada tahun 2019 tercatat 85,98% atau sebesar **438.816,6 km (15.847 buah)** jembatan dalam kondisi mantap dari total **510.366,2 km (18.648 buah)**. Provinsi yang memiliki total panjang jembatan terpanjang adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar **31.499,45 km** dengan jembatan dalam kondisi mantap sebesar **90,89%** dan kondisi tidak mantap sebesar **9,11%**.

Kondisi Jembatan per Provinsi



CIPTA KARYA

Data Dapat Diakses Melalui :



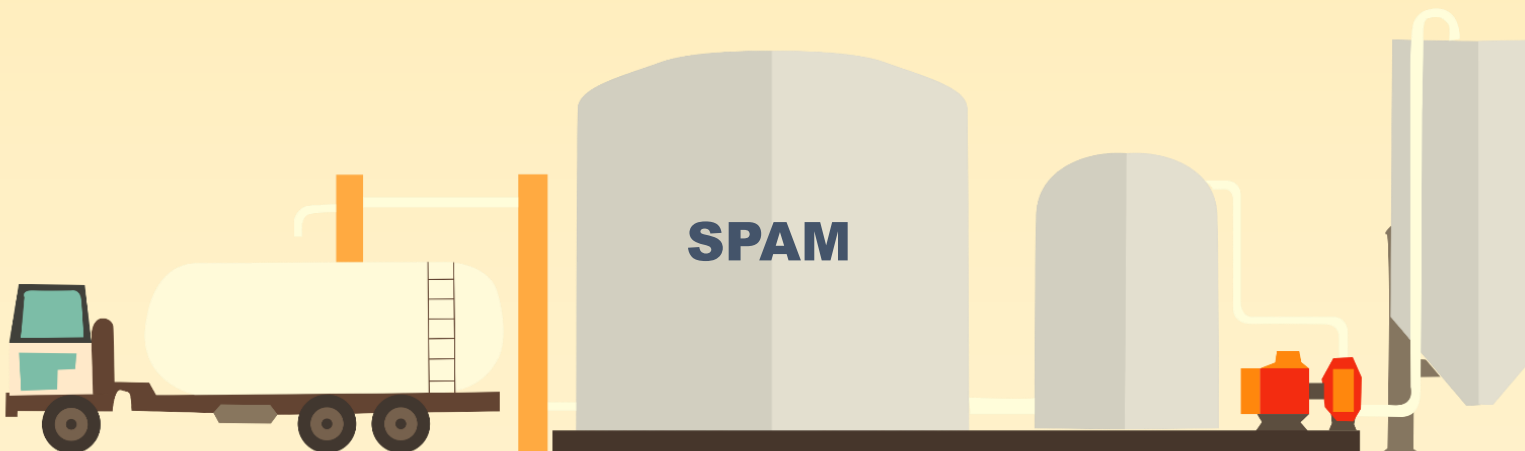
<https://data.pu.go.id/group/cipta-karya>



PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini juga memengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. SPAM dapat dilakukan melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Dalam SPAM jaringan perpipaan, air minum disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Sementara SPAM bukan perpipaan air minum disalurkan atau diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan. SPAM Jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Sementara SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air.

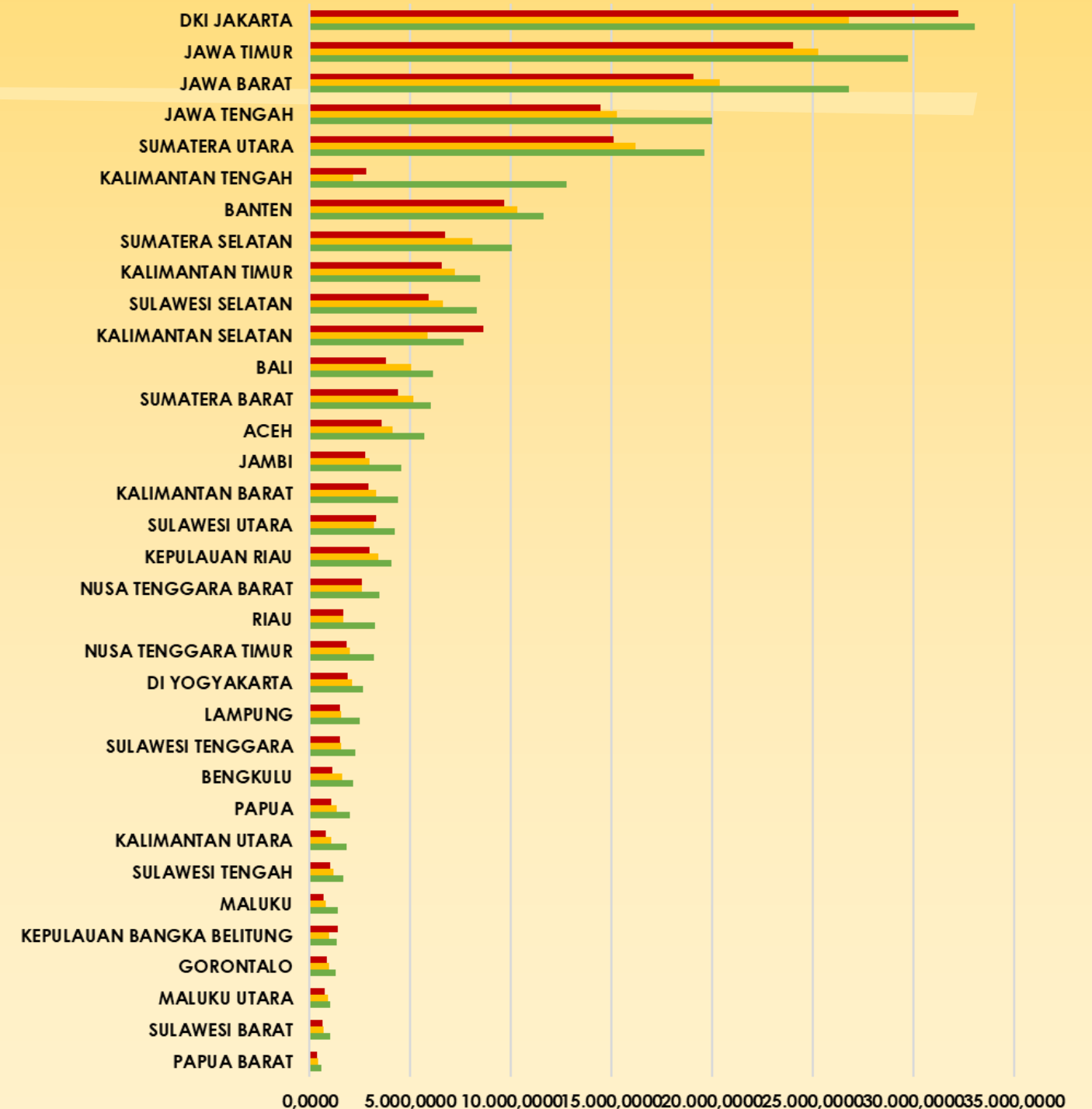


SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN

Sumber : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya



■ KAPASITAS DISTRIBUSI (liter/detik) ■ KAPASITAS PRODUKSI (liter/detik) ■ KAPASITAS TERPASANG (liter/detik)

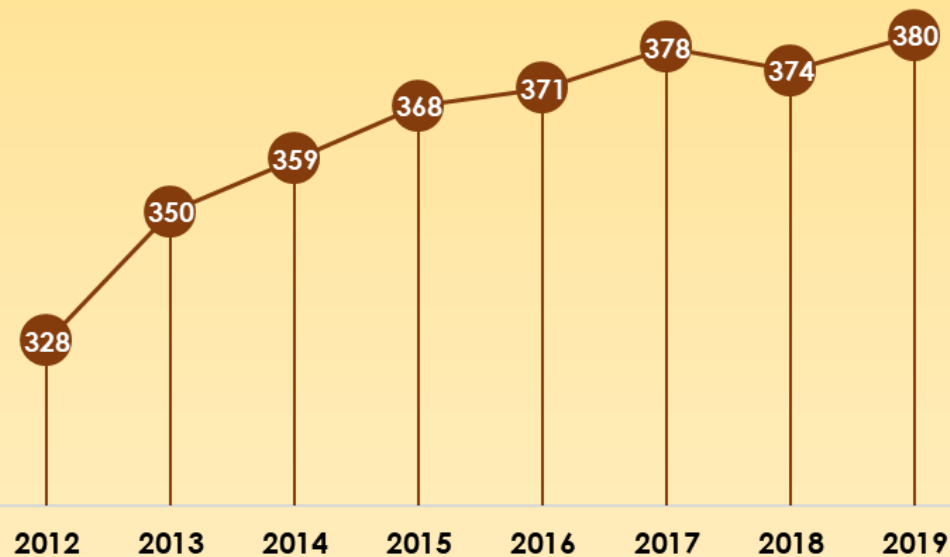


PENILAIAN KINERJA PDAM

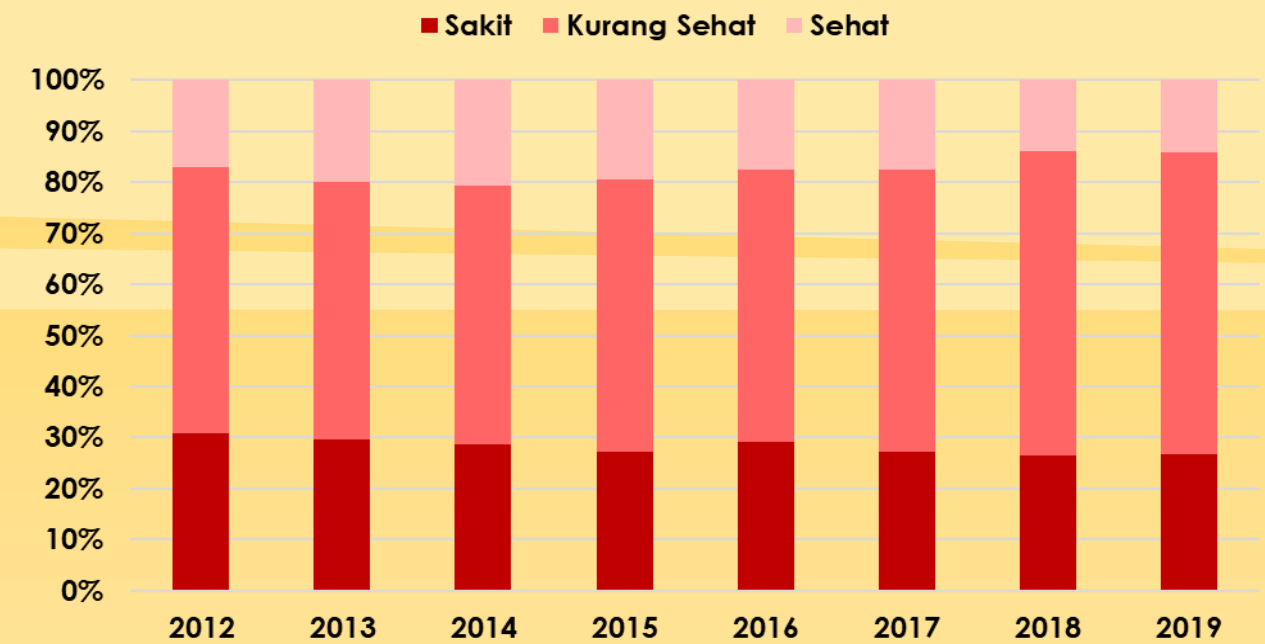
Penyelenggaraan SPAM bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UPT, UPTD atau badan usaha. Untuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh BUMN dan atau BUMD khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) melakukan penilaian kinerja secara berkala setiap tahunnya. Kinerja tersebut dilakukan dengan menilai 4 aspek, yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Jumlah PDAM yang dinilai pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 380 PDAM

Tren Jumlah PDAM 2012-2019



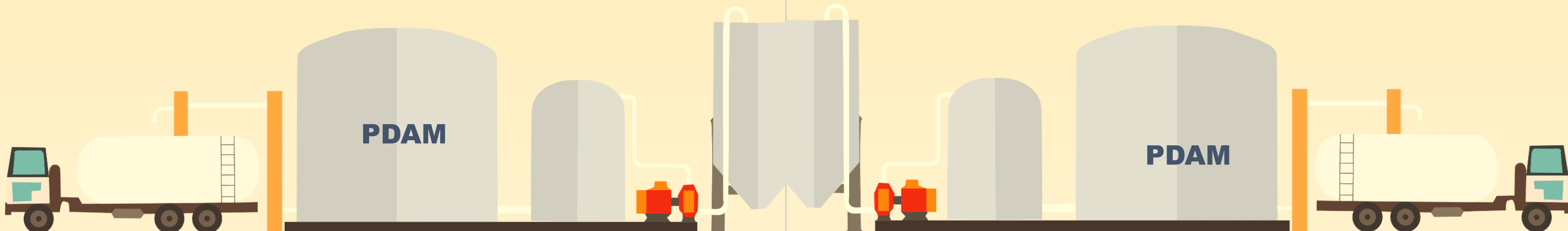
Kinerja PDAM 2012-2019



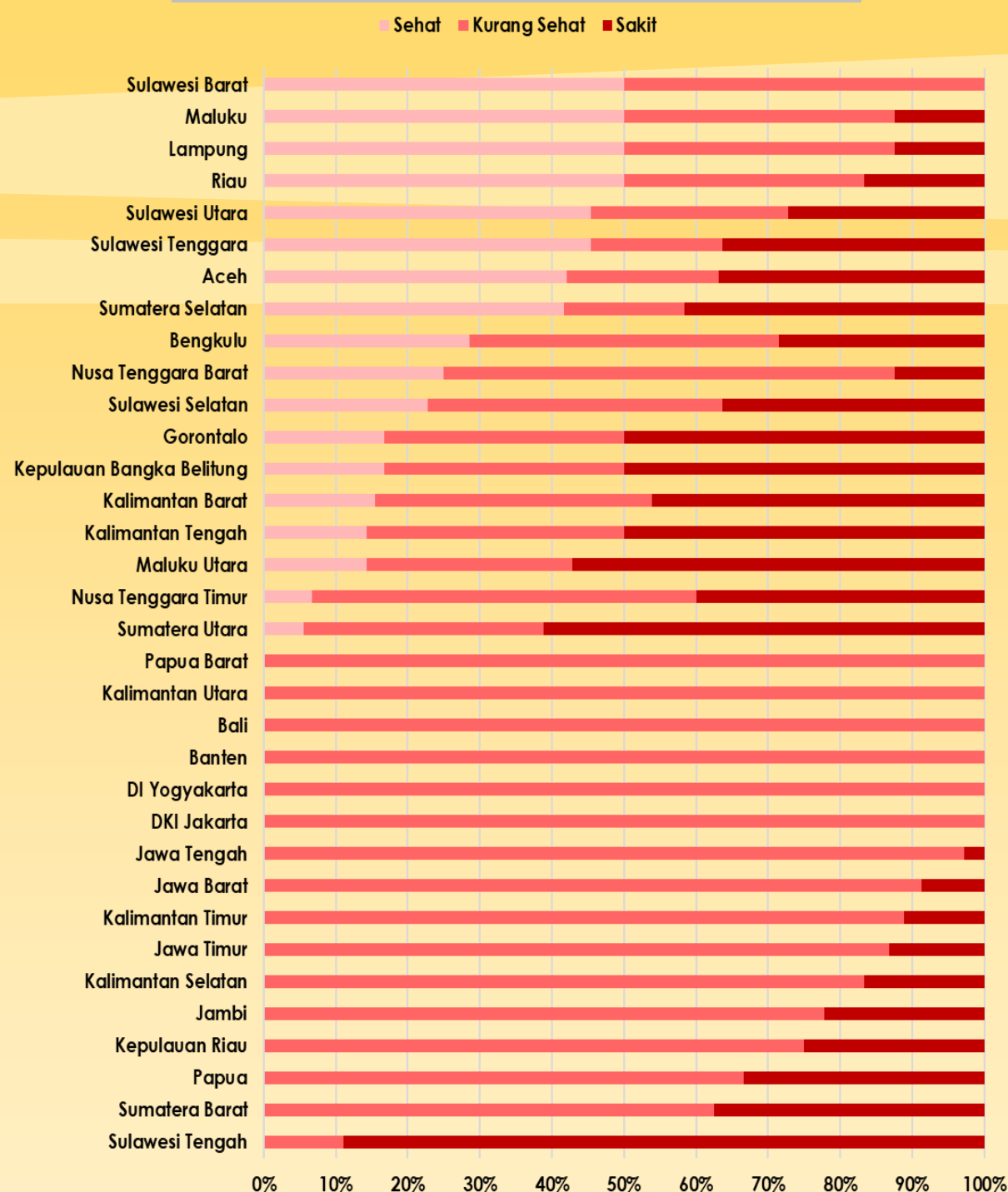
Sumber : Kinerja PDAM 2019, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Kinerja PDAM di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 didominasi oleh kategori PDAM kurang sehat dengan persentase 50% sampai dengan 60%. Persentase PDAM kategori sakit masih lebih tinggi dibanding PDAM kategori sehat yaitu 26% sampai 31%.

Pada tahun 2019 kinerja PDAM mengalami peningkatan yaitu PDAM kategori sehat meningkat menjadi 14,21%.

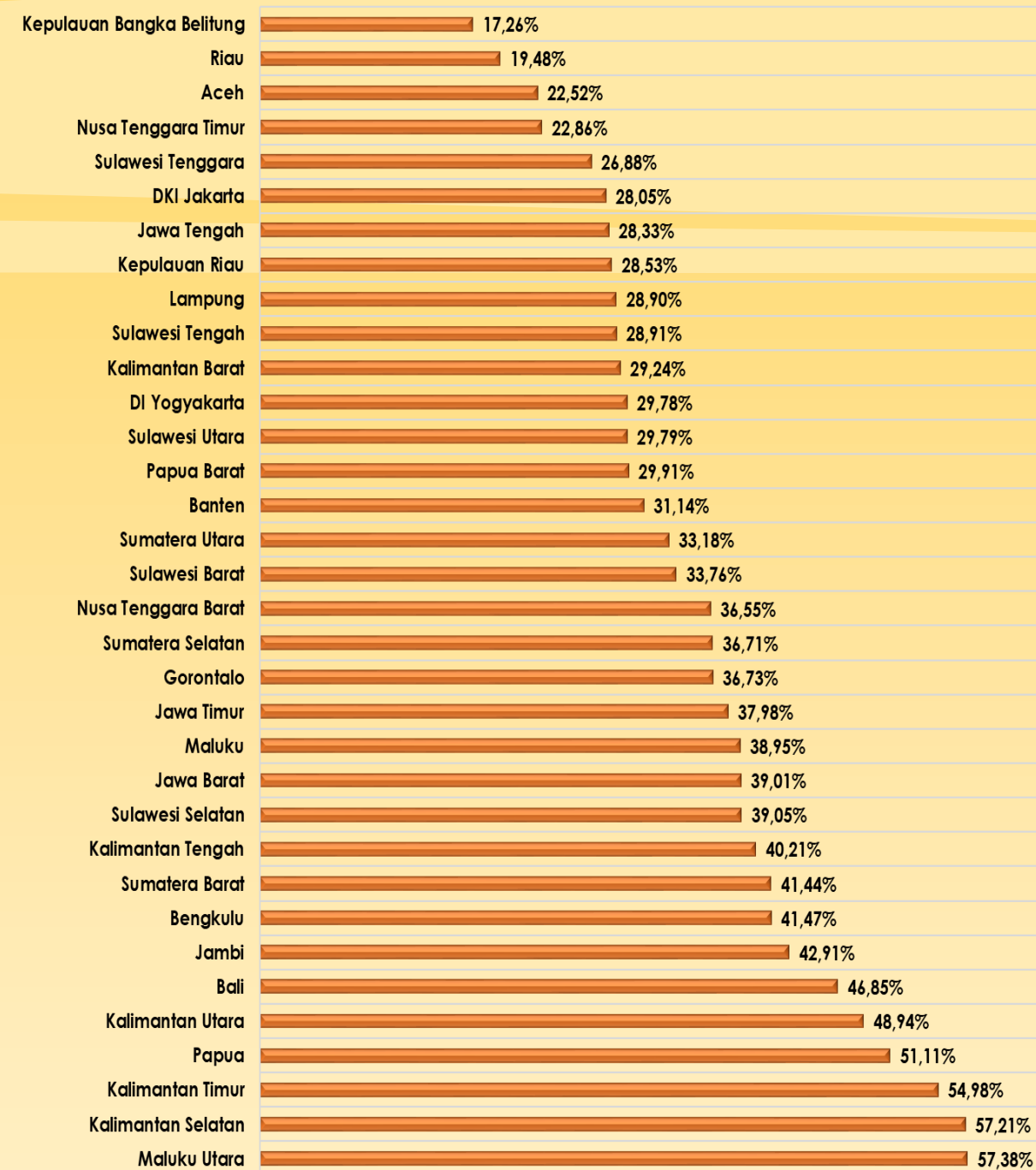


Kinerja PDAM Per Provinsi



Hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2019 menurut provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan penilaian kinerja PDAM tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Riau, dan Provinsi Lampung, dengan masing-masing memiliki PDAM dengan kondisi sehat sebesar 50%.

Persentase Penduduk Terlayani



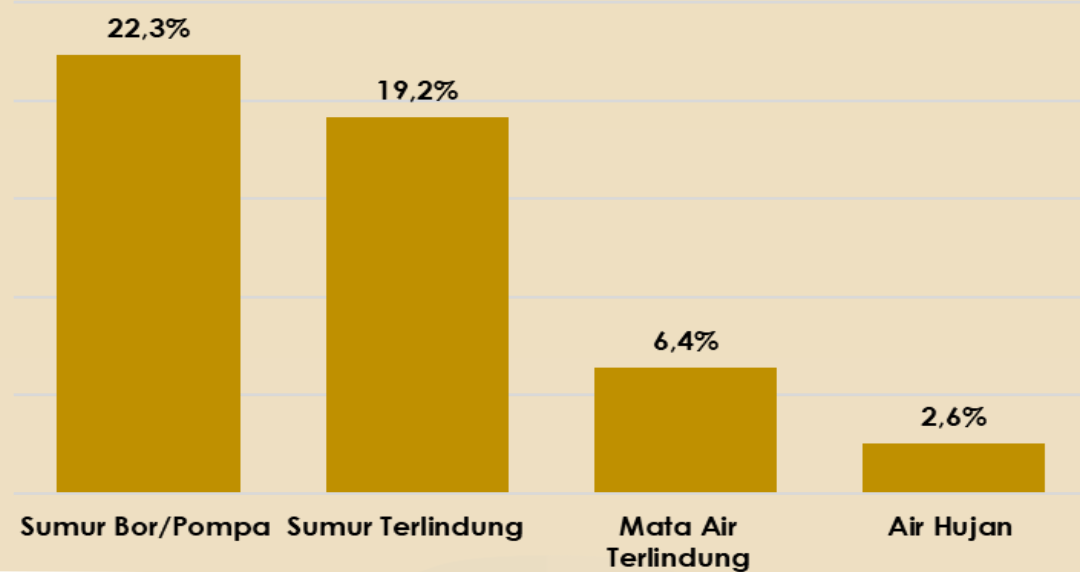
Persentase penduduk terlayani tertinggi di Maluku Utara sebesar 57,38% atau sebanyak 421.556 jiwa dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya sebanyak 734.721 jiwa. Sedangkan penduduk terlayani terbanyak adalah terdapat pada Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 10.133.803 jiwa atau sebesar 39,01% dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya.

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

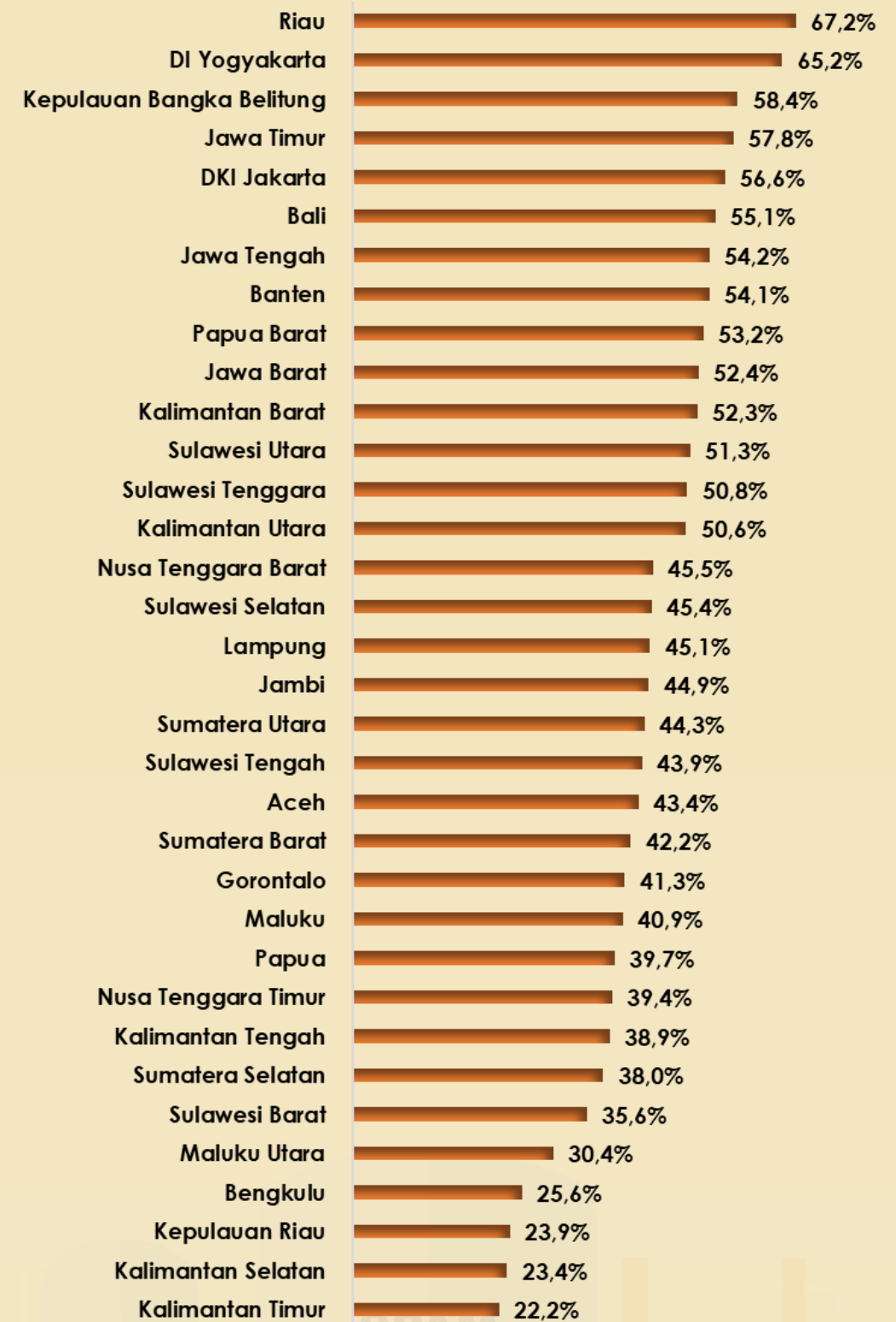
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN

Sebagaimana disampaikan bahwa SPAM dapat dijalankan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air. Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur bor/pompa sebanyak 14.589.830 atau sebesar 22,3%. Sedangkan banyaknya pengguna sumur terlindungi sebanyak 12.541.497 rumah tangga atau sebesar 19,2%. Pengguna mata air terlindungi dan air hujan masing-masing sebanyak 4.174.395 dan 1.674.947 rumah tangga atau sebesar 6,4% dan 2,6%.

Jumlah Rumah Tangga Pengguna SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Berdasarkan Jenisnya



Persentase Rumah Tangga Pengguna SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Berdasarkan Provinsi



Sumber : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya

TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah yang dikelola yaitu, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah-sampah tersebut harus dikelola dengan baik agar tercipta lingkungan hidup yang sehat, sekaligus memperoleh manfaat yang mungkin masih bisa diperoleh dari keberadaannya.

Pengelolaan sampah telah diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 2008. Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pemrosesan sampah didahului dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah/volume sampah. Penyediaan TPA di kota-kota besar menghadapi kendala keterbatasan lahan. Oleh sebab itu, pengelolaan TPA secara regional menjadi lebih dibutuhkan.

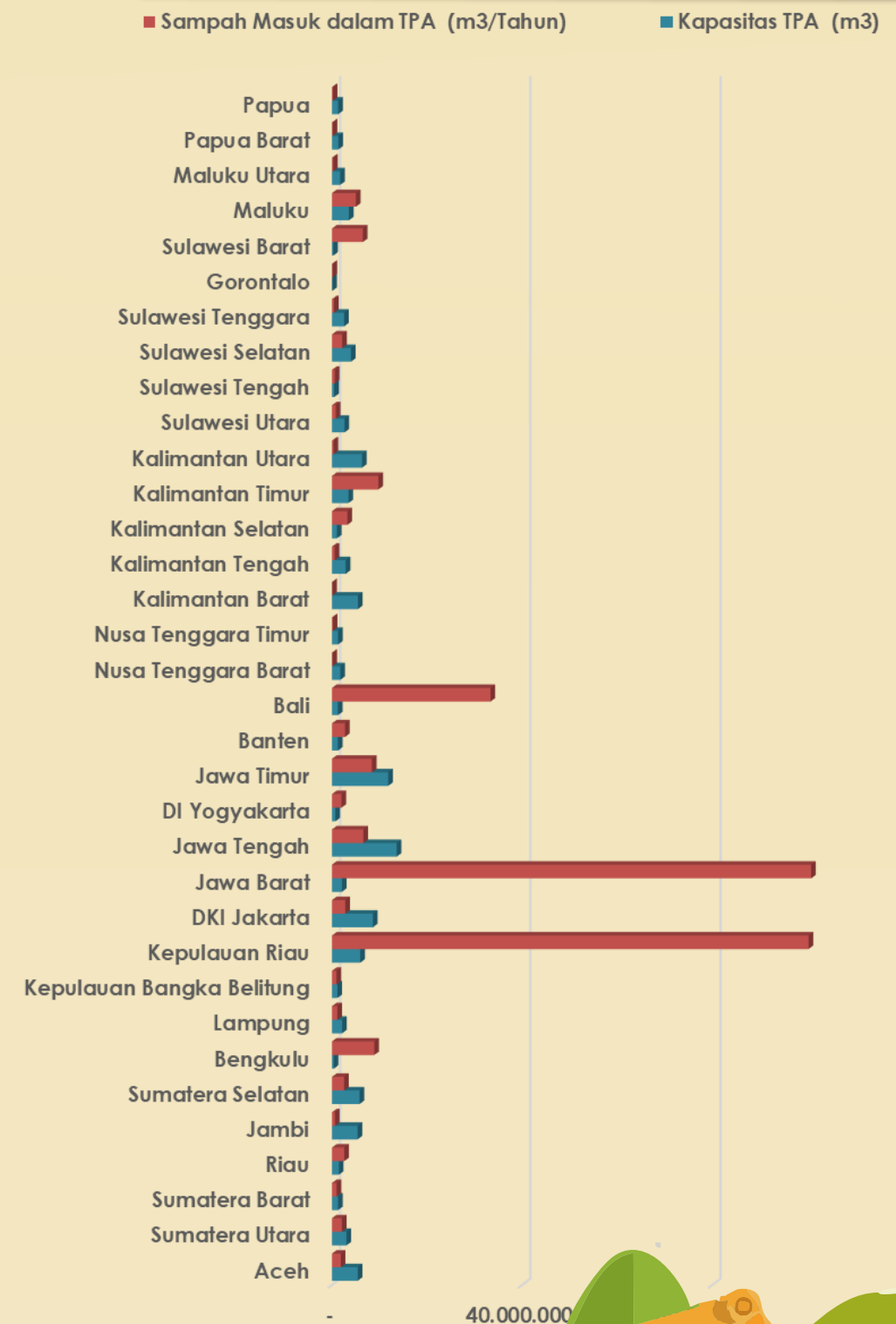
Kapasitas TPA vs Sampah Masuk Dalam TPA

SAMPAH MASUK DALAM TPA
308.839.730 m³/Tahun

KAPASITAS TPA
111.197.710 m³



Kapasitas TPA vs Sampah Masuk TPA Berdasarkan Provinsi

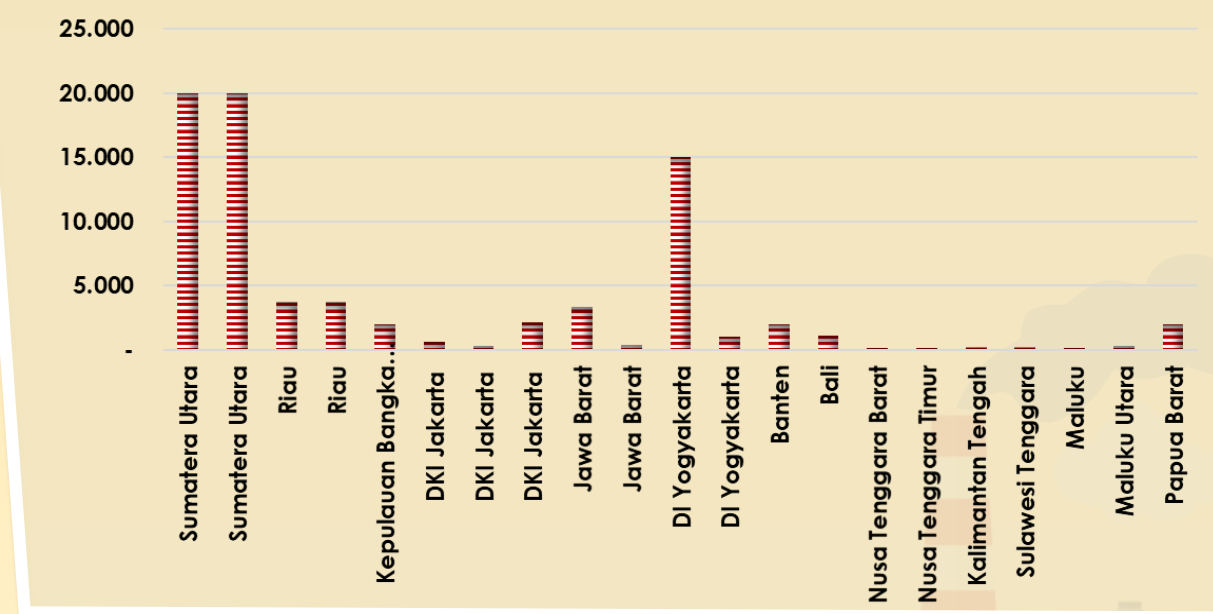


Instalasi Pengolahan Air Limbah

Lingkungan layak huni adalah lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan yang sering muncul di antaranya berkaitan dengan pembuangan limbah. Limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, baik limbah air, udara, maupun tanah. Limbah yang tidak melalui proses pengolahan akan merusak sumber air baik air permukaan maupun air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, dan dapat merusak tanah.

Untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat maka pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah. Sistem pengelolaan limbah dilakukan dengan 2 cara yaitu sistem setempat/kawasan (*on site*) dan sistem terpusat (*off site*). Kota-kota besar pada umumnya menggunakan IPAL terpusat, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pencemaran oleh air limbah rumah tangga. Kendala dalam pengembangan IPAL terpusat adalah biaya investasi yang besar. Oleh sebab itu, dikembangkan pula IPAL kawasan yang dapat melayani daerah perkotaan maupun desa dengan sistem komunal.

Cakupan Layanan Berdasarkan Provinsi



Sumber : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya

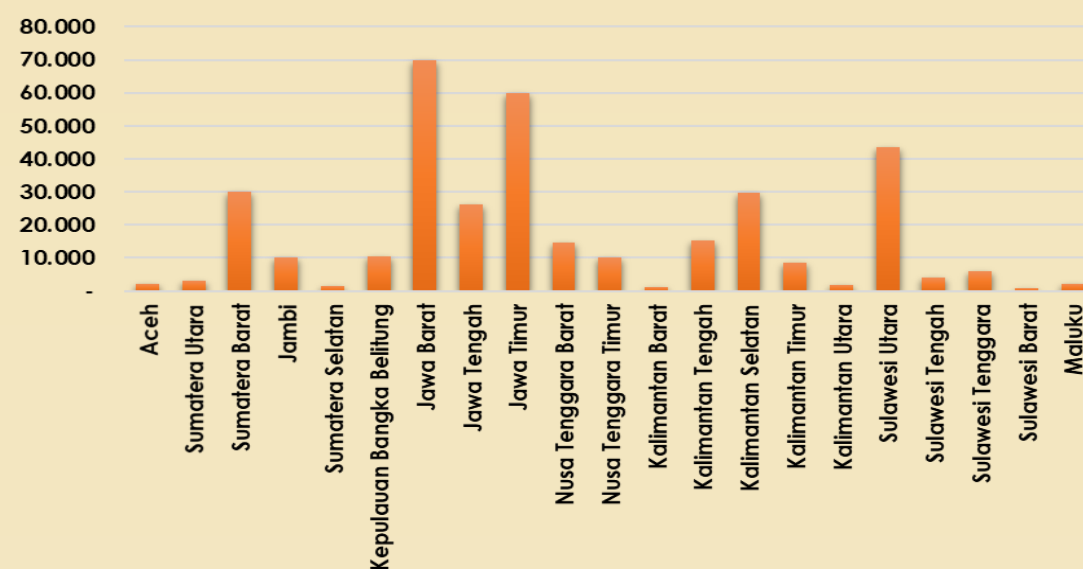
Provinsi	Nama IPAL
Sumatera Utara	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Medan Zona 12
Sumatera Utara	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Medan Zona 10 dan 11
Riau	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Pekanbaru Zona 1
Riau	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Pekanbaru Zona 2
Kepulauan Bangka Belitung	Sanitasi KSPN Tanjung Kelayang
DKI Jakarta	Sanitasi KSPN Kepulauan Seribu
DKI Jakarta	Sanitasi Kawasan Istana Kepresidenan Jakarta
DKI Jakarta	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Semper Barat
Jawa Barat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Cimanggis
Jawa Barat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Pondok Pesantren Cipasung
D.I. Yogyakarta	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Sewon
D.I. Yogyakarta	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Berbah
Banten	Sanitasi KSPN Tanjung Lesung
Bali	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Seseetan dan Sekitarnya
Nusa Tenggara Barat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Gili Trawangan
Nusa Tenggara Timur	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Tambolaka
Kalimantan Tengah	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Sukamara
Sulawesi Tenggara	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Tomia
Maluku	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Desa Neniari
Maluku Utara	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Kabupaten Kepulauan Sula
Papua Barat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Kabupaten Teluk Wondama



Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja merupakan salah satu yang terpenting dalam penyediaan sanitasi yang sehat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki tangki septik yang memenuhi syarat, yaitu kedap air. Tangki septik yang dimiliki masyarakat saat ini perlu dilakukan pemeliharaan/penyedotan dalam 2-3 tahun, apabila tidak maka dapat mencemari air tanah.

Cakupan Layanan Berdasarkan Provinsi



Sumber : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama IPLT
Aceh	Aceh Jaya	IPLT Kab. Aceh Jaya
	Aceh Timur	IPLT Kab. Aceh Timur
Sumatera Utara	Dairi	IPLT Kab. Dairi
	Serdang Bedagai	IPLT Kab. Serdang Bedagai
Sumatera Barat	Agam	IPLT Kab. Agam
Jambi	Tebo	IPLT Kab. Tebo
Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	IPLT Kota Prabumulih
	Ogan Ilir	IPLT Kab. Ogan Ilir
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	IPLT Kab. Bangka
	Bangka Barat	IPLT Kab. Bangka Barat
	Belitung Timur	IPLT Kab. Belitung Timur
Jawa Barat	Kota Bandung	IPLT Kompak Kota Bandung
	Bogor	IPLT Cibinong
Jawa Tengah	Pekalongan	IPLT Kab. Pekalongan
	Temanggung	IPLT Kab. Temanggung
Jawa Timur	Kota Malang	IPLT Kota Malang
	Kota Probolinggo	IPLT Kota Probolinggo
	Ngawi	IPLT Kab. Ngawi
Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	IPLT Kota Bima
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	IPLT Waingapu
Kalimantan Barat	Sambas	IPLT Kab. Sambas
Kalimantan Tengah	Gunung Mas	IPLT Kab. Gunung Mas
	Kota Palangka Raya	IPLT Kota Palangka Raya
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	IPLT Kab. Hulu Sungai Tengah
	Hulu Sungai Utara	IPLT Kab. Hulu Sungai Utara
	Tapin	IPLT Kab. Tapin
Kalimantan Timur	Kutai Barat	IPLT Kota Sendawar
Kalimantan Utara	Tana Tidung	IPLT Kab. Tana Tidung
Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	IPLT Kab. Kepulauan Talaud
	Kota Tomohon	IPLT Kota Tomohon
	Minahasa	IPLT Kab. Minahasa
Sulawesi Tengah	Tojo Una-una	IPLT Kab. Tojo Una-una
	Kolaka	IPLT Kab. Kolaka
Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	IPLT Kab. Kolaka Utara
	Kota Kendari	IPLT Kota Kendari
Sulawesi Barat	Majene	IPLT Kab. Majene
	Kota Tual	IPLT Kota Tual
Maluku		
	Maluku Tengah	IPLT Kab. Maluku Tengah

IPLT

Instalasi
Pengolahan
Lumpur
Tinja



PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sesuai dengan agenda Nawacita yang diusung oleh Pemerintah, terdapat 2 poin yang berkaitan dengan pengembangan permukiman. Pertama yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Agenda tersebut diwujudkan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pinggiran dan perdesaan, membangun perumahan dan kawasan permukiman dengan fokus pada permukiman kumuh, pelayanan air minum, pelayanan sanitasi, keselamatan bangunan dan gedung, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.

Permukiman layak huni didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, digunakan tiga strategi pendekatan, yaitu membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebagai nakhkoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah, serta memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Pembangunan infrastruktur permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, dengan tujuan meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan, dengan tujuan mengurangi luasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.

Kawasan Permukiman Perkotaan

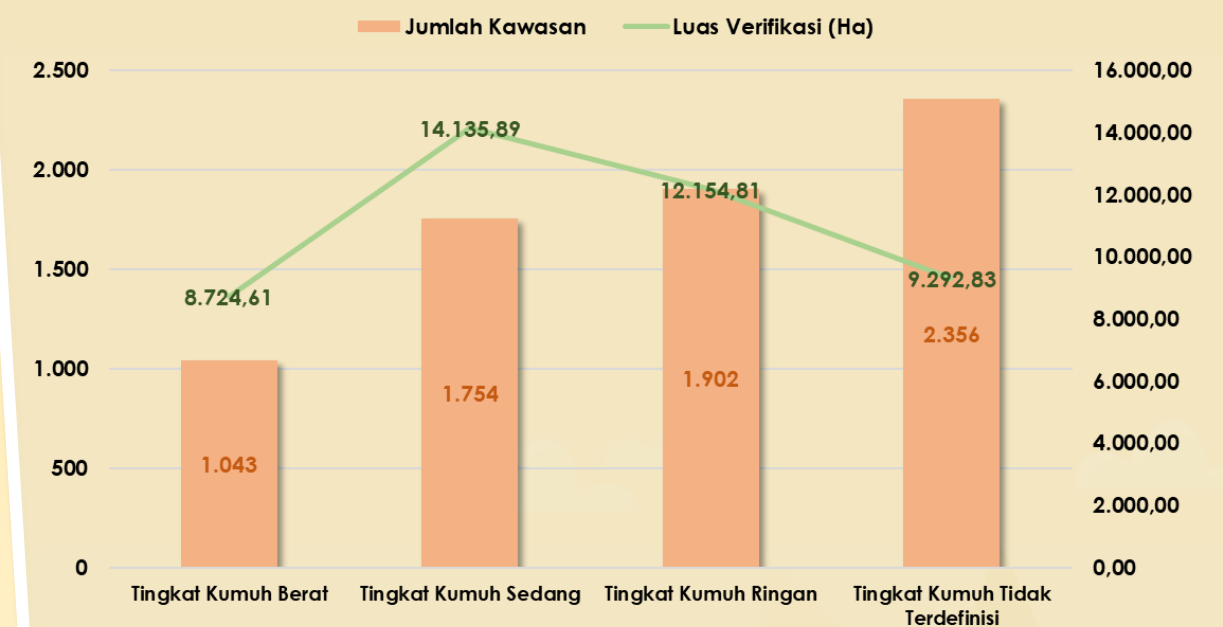
Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman sehingga menyebabkan rendahnya kualitas permukiman dan kehidupan penghuninya. Kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang salah satunya dipicu oleh laju urbanisasi. Pertumbuhan penduduk ini tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu tumbuhnya jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh. Selain itu, penanganan kawasan kumuh memerlukan koordinasi lintas sektor dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan SK Bupati/Wali kota tentang permukiman kumuh sebagai acuan dalam memadukan upaya penanganan permukiman kumuh.

Terdapat 7 kriteria dalam lingkup keciptakarya yang menjadi indikator dikatakan kumuh atau tidaknya suatu permukiman, yaitu pemenuhan pelayanan air bersih perpipaan, pelayanan pengolahan air kotor, drainase dan pengendalian banjir, pemadam kebakaran, ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, dan penanggulangan bencana. Kriteria tersebut bersama dengan beberapa kriteria dari aspek lainnya menjadi bagian dari kriteria kota layak huni.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011** tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta **Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016** tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dijelaskan mengenai pencegahan, peningkatan kualitas dan pengelolaan permukiman kumuh. Pencegahan dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, yang terdiri atas pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan kesesuaian perizinan, standar teknis, dan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dengan penetapan lokasi kumuh dan dilakukan melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Kemudian pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Berikut ini adalah kota-kota yang menjadi prioritas untuk mendapat penanganan permukiman kumuh perkotaan dari Kementerian PUPR.

Jumlah Kota Kumuh yang Menjadi Prioritas Penanganan



Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan pedesaan memiliki beragam potensi seperti potensi sumber daya alam (pertanian dan perkebunan, perikanan, dan pariwisata), sumber daya manusia (budaya, kearifan lokal, dan kewirausahaan) yang apabila dikelola secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas kawasan permukiman pedesaan sekaligus mensejahterakan masyarakatnya. Oleh sebab itu, penanganan kawasan pedesaan dilakukan dengan konsep pengembangan kawasan strategis kabupaten (KSK). Pengembangan KSK dilakukan untuk memperkuat ekonomi setempat, di antaranya melalui pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku usaha masyarakat, penyediaan permodalan pengembangan komoditas unggulan dan usaha lokal, dan penguatan kelembagaan pengelola KSK. Selain itu, dalam pengembangan KSK juga dilakukan penyediaan infrastruktur dasar wilayah seperti pendidikan, kesehatan, energi, air bersih dan sanitasi, transportasi, dan pelayanan publik. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Kawasan Permukiman Khusus

Penyelenggaraan permukiman khusus pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan permukiman perkotaan dan pedesaan, namun memiliki karakter khusus, seperti kawasan pulau-pulau kecil terluar, kawasan perbatasan, kawasan rawan bencana, kawasan pasca bencana, dan kawasan permukiman tertentu yang ditetapkan melalui undang-undang.

Kawasan Permukiman Pulau Kecil Terluar

Pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Dalam **Undang-Undang No. 27 Tahun 2007** tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dijelaskan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km beserta dengan kesatuan ekosistemnya.

Dalam **Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017** tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat **111 pulau** sebagai pulau-pulau kecil terluar yang menjadi pagar terdepan Indonesia. Pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis nasional untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. Selain itu, pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Kawasan Permukiman Perbatasan

Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah NKRI yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, kawasan perbatasan juga menjadi wajah terdepan dan representasi bangsa sekaligus pintu gerbang keluar dan masuknya manusia dan barang.

Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan pengembangan infrastruktur pendukung di sekitarnya. PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara. Fungsi yang dijalankan oleh PLBN antara lain keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, serta fungsi-fungsi lain yang diperlukan. Infrastruktur yang terdapat di PLBN meliputi gedung PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, bangunan check point, koridor pejalan kaki, klinik, wisma Indonesia, tempat ibadah, mess karyawan, dan lain-lain. Sementara pengembangan infrastruktur pendukung di wilayah perbatasan meliputi penyediaan jaringan transportasi, air minum, drainase, pengolahan limbah, serta persampahan. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan adanya pengikatan ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan; tercipta kelembagaan lintas batas negara yang terpadu; serta peningkatan kerja sama dengan negara tetangga. Pembangunan itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Selain pembangunan PLBN, dilakukan pula pengembangan infrastruktur permukiman (PIP) di 9 kawasan, yaitu Entikong, Nanga Badau, Aruk, Mota'ain, Motamasin, Wini, Skouw, Sebatik Tengah, dan Long Aprari.

Pos Lintas Batas Negara

Nama PLBN	Kabupaten/Kota	Provinsi
Serasan	Natuna	Kepulauan Riau
Jagoi Babang	Bengkayang	Kalimantan Barat
Sei Kelik	Sintang	Kalimantan Barat
Long Nawang	Malinau	Kalimantan Utara
Long Midang/Krayan	Nunukan	Kalimantan Utara
Sei Pancang Sebatik	Nunukan	Kalimantan Utara
Labang	Nunukan	Kalimantan Utara
Oepoli	Kupang	Nusa Tenggara Timur
Napan	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
Yetetkun	Boven Digoel	Papua
Sota	Merauke	Papua

Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perbatasan

Kawasan	Kabupaten/Kota	Provinsi
Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
Nanga Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
Mota'ain	Belu	Nusa Tenggara Timur
Motamasin	Malaka	Nusa Tenggara Timur
Wini	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
Skouw	Jayapura	Papua
Sebatik Tengah	Nunukan	Kalimantan Utara
Long Aprari	Mahakam Hulu	Kalimantan Timur

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kawasan Permukiman Rawan dan Pasca Bencana

Indonesia merupakan negeri yang rawan bencana alam karena berada di jalur gunung berapi teraktif di dunia, yaitu Cincin Api Pasifik. Selain itu, wilayah Indonesia terdiri atas tiga tumpukan lempeng benua yang aktif, yaitu lempeng Austronesia, Asia, dan Pasifik. Oleh sebab itu perkembangan permukiman di Indonesia tidak dapat lepas dari mempertimbangkan kondisi yang tidak dapat dihindari tersebut. Meskipun demikian, dengan berbagai penanganan diharapkan dapat meminimalkan jumlah kerugian yang mungkin timbul bencana.

Strategi yang dapat dilakukan untuk penanganan risiko pada daerah rawan bencana adalah:

- Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah
- Penyediaan kajian dan peta risiko untuk perencanaan pembangunan
- Penyusunan RPJMD dan RTRWP/K yang sensitif terhadap risiko bencana
- Penyediaan dan operasionalisasi sistem peringatan dini
- Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan untuk membangun budaya keselamatan terhadap bencana
- Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sementara apabila sudah terjadi bencana, maka yang dapat dilakukan adalah penanganan pasca bencana, yaitu melalui :

- Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah
- Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan terhadap bencana
- Perkuatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat
- Partisipasi dan peran serta multi pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Masyarakat dan pemerintah harus memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan agar dapat melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, baik dengan memperkecil ancaman kawasan, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

Prioritas

Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mendukung pelaksanaan proyek strategis percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan parawisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dukungan penanganan permukiman di kawasan strategis pariwisata dilakukan untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang aman, nyaman, menarik, mudah dijangkau, berwawasan lingkungan, serta dapat meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan juga masyarakat. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata diarahkan untuk pengembangan perintisan DPN, peningkatan kualitas dan daya saing, serta pengendalian bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung. Penyediaan prasarana umum yang menjadi bagian dari tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya di DPN meliputi jaringan air bersih dan sistem pengelolaan limbah. Sementara prasarana umum yang menjadi tugas instansi lain meliputi jaringan listrik dan lampu penerangan serta jaringan telekomunikasi. Berikut ini merupakan 10 KSPN yang menjadi prioritas untuk ditangani dimulai dari perencanaan di tahun 2016 hingga pelaksanaan fisik di tahun 2017-2019.



Kawasan	Provinsi
Danau Toba	Sumatera Utara
Tanjung Kelayang	Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
Tanjung Lesung	Banten
Borobudur	Jawa Tengah
Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur
Mandalika	Nusa Tenggara Barat
Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur
Wakatobi	Sulawesi Tenggara
Morotai	Maluku Utara

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air

Penataan kampung nelayan merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden RI pada pertengahan tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.

Telah teridentifikasi 11 kawasan permukiman nelayan/tepi air yang berpotensi sebagai percontohan. sebelas kawasan tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kawasan percontohan ini diharapkan dapat menghasilkan strategi inovatif untuk dikembangkan sebagai acuan pengembangan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan.. Berikut ini 11 kawasan tersebut:

Kawasan	Kabupaten/Kota
Kampung Sumber Jaya	Kota Bengkulu
Kampung Nelayan Tegalsari	Kota Tegal
Kampung Beting	Kota Pontianak
Kampung Kuin	Kota Banjarmasin
Kampung Hamadi	Kota Jayapura
Kampung Nelayan Oesapa	Kota Kupang
Kampung Nelayan Untia	Kota Makasar
Kampung Nelayan Indah	Kota Medan
Kampung Tambak Lorok	Kota Semarang
Kampung Moro Demak	Kabupaten Demak
Kampung Karangsong	Kabupaten Indramayu

Bina Penataan Bangunan (BPB)

Pembangunan Kota Hijau

Kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya, seperti air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menjadi strategi perencanaan pembangunan untuk menjamin daya dukung lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Sejak tahun 2011, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai bentuk implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten. Untuk mewujudkan kota hijau melalui P2KH, diterapkan sub-sistem lingkungan yang diistilahkan dengan 8 (delapan) atribut Kota Hijau, yaitu:

1. Perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan
2. Ketersediaan ruang terbuka hijau
3. Peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau
4. Pengelolaan sampah ramah lingkungan
5. Pengelolaan air yang efektif
6. Penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan
7. Konsumsi energi yang efisien
8. Bangunan hijau.

P2KH menjadi bentuk tanggung jawab yang Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik dan perwujudan delapan atribut kota hijau sesuai amanat Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan sebagai upaya untuk menjawab tantangan perubahan iklim.

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama RTH	Luas Kawasan
Sumatera Utara	Karo	Pembangunan RTH Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara	25.000 m ²
Jambi	Muara Tebo	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kab. Tebo Kecamatan Tebo Tengah Provinsi Jambi	1 Kawasan
Sumatera Selatan	Prabumulih	Pembangunan RTH Kota Prabumulih	10.000 m ²
Bengkulu	Lebong	Penataan RTH Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu	13.500 m ²
Jawa Barat	Tasikmalaya	Pembangunan RTH Kota Tasikmalaya	5.000 m ²
Jawa Tengah	Magelang	Penataan RTH Kws. Jembatan Gantung Mangunsuko Kab. Magelang	1 Kawasan
Jawa Timur	Blitar	Penataan Kawasan RTH Kanigoro Kabupaten Blitar	7.200 m ²
	Surabaya	Pembangunan RTH Kawasan Sukolilo Kota Surabaya	100.000 m ²
	Pasuruan	Penataan RTH Umbulan Kabupaten Pasuruan	1 Kawasan
Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Penataan RTH Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	22.737 m ²
Kalimantan Timur	Samarinda	Pembangunan RTH Kota Samarinda	10.390 m ²
Sulawesi Tengah	Poso	Pembangunan RTH Ex. Pasar Central Gebangrejo (Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah)	29.200 m ²
	Palu	Pembangunan RTH Kawasan Hutan Kota Palu (Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah)	21.900 m ²
Sulawesi Selatan	Makassar	Penataan RTH Pelataran Gedung Wisma Negara Kws. Center Point Of Indonesia Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	10.559 m ²
Papua Barat	Sorong	Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Sorong	1 Kawasan

Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

Aset pusaka merupakan rekam jejak sejarah bangsa Indonesia, dari era kerajaan nusantara hingga setelah memperoleh kemerdekaan bangsa. Aset-aset tersebut memiliki nilai kearifan lokal yang otentik dan amat penting keberadaannya. Oleh sebab itu, negara bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Kota Pusaka adalah kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian aset pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Provinsi	Kabupaten/Kota	Tujuan
Jambi	Sungai Penuh	Meningkatkan Fasilitas dan sarana ditempat Kawasan Kota Pusaka dan terjaganya kelestarian kawasan pusaka yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah.
Bengkulu	Bengkulu	Sebagai wadah untuk melestarikan budaya / kearifan lokal di Kws. Tanjung Agung.
Gorontalo	Gorontalo	Manfaat Teras adalah sarana interaksi sosial untuk masyarakat, dalam hal ini sebagai ruang bermain anak-anak, tempat swafoto, rekreasi keluarga, olahraga, dan juga kegiatan acara outdoor. Manfaat Souvenir: untuk menyediakan tempat penjualan souveinir di area kawasan otanaha.
Riau	Siak	Benda Cagar Budaya sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi Untuk kepentingan Agama, sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.
Jawa Tengah	Surakarta	Sebagai dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap Pengembangan Kawasan Pusaka (bangunan cagar budaya) keraton Mangkunegaran Kota Surakarta dan penataan ini juga dilakukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana wisata sehingga dapat menambah kenyamanan pengunjung.
Jawa Timur	Sumenep	Sebagai sarana edukasi, tempat bermain dan wisata.
Maluku Utara	Malut	Menambah luasan RTH seluas 2.000 m ² , dan dapat menambah kunjungan wisatawan sekitar 500 Jiwa.

PERUMAHAN



Data Dapat Diakses Melalui :



<https://data.pu.go.id/group/ditjen-perumahan>

HUNIAN LAYAK UNTUK INDONESIA

Status Data : 25 September 2020

Sumber Data : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

119,6 ribu
Rumah Umum
Komersial

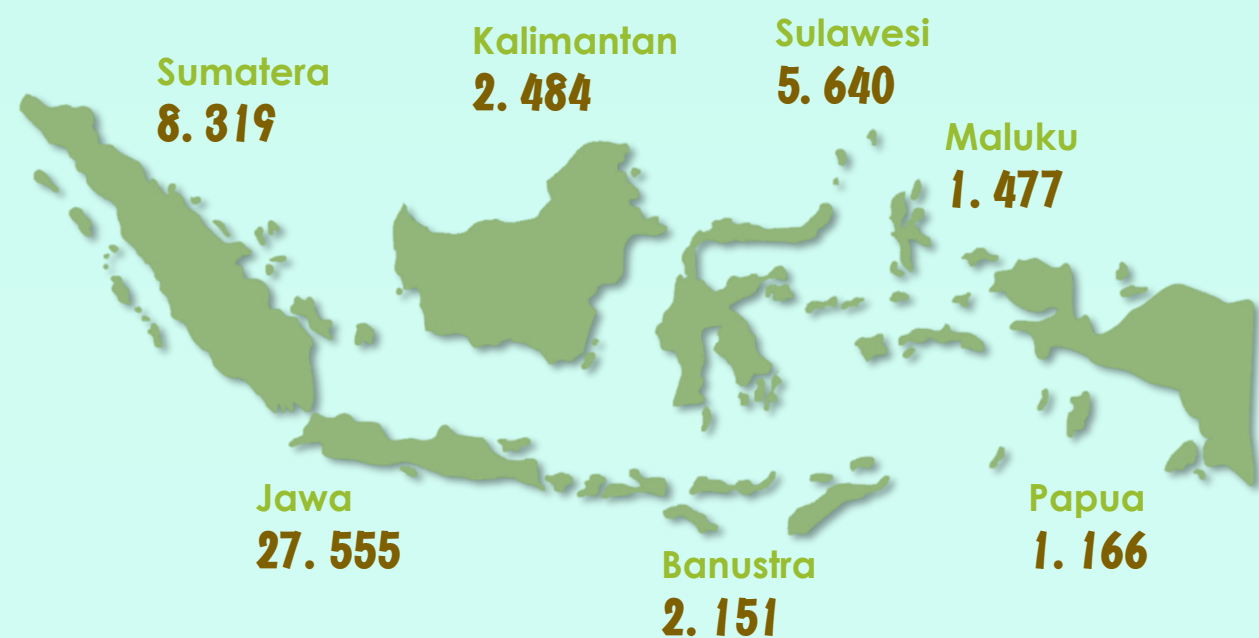
48,8 ribu
Rumah Susun

236 ribu
Peningkatan Kualitas
5,4 ribu
Pembangunan Baru
BSPS

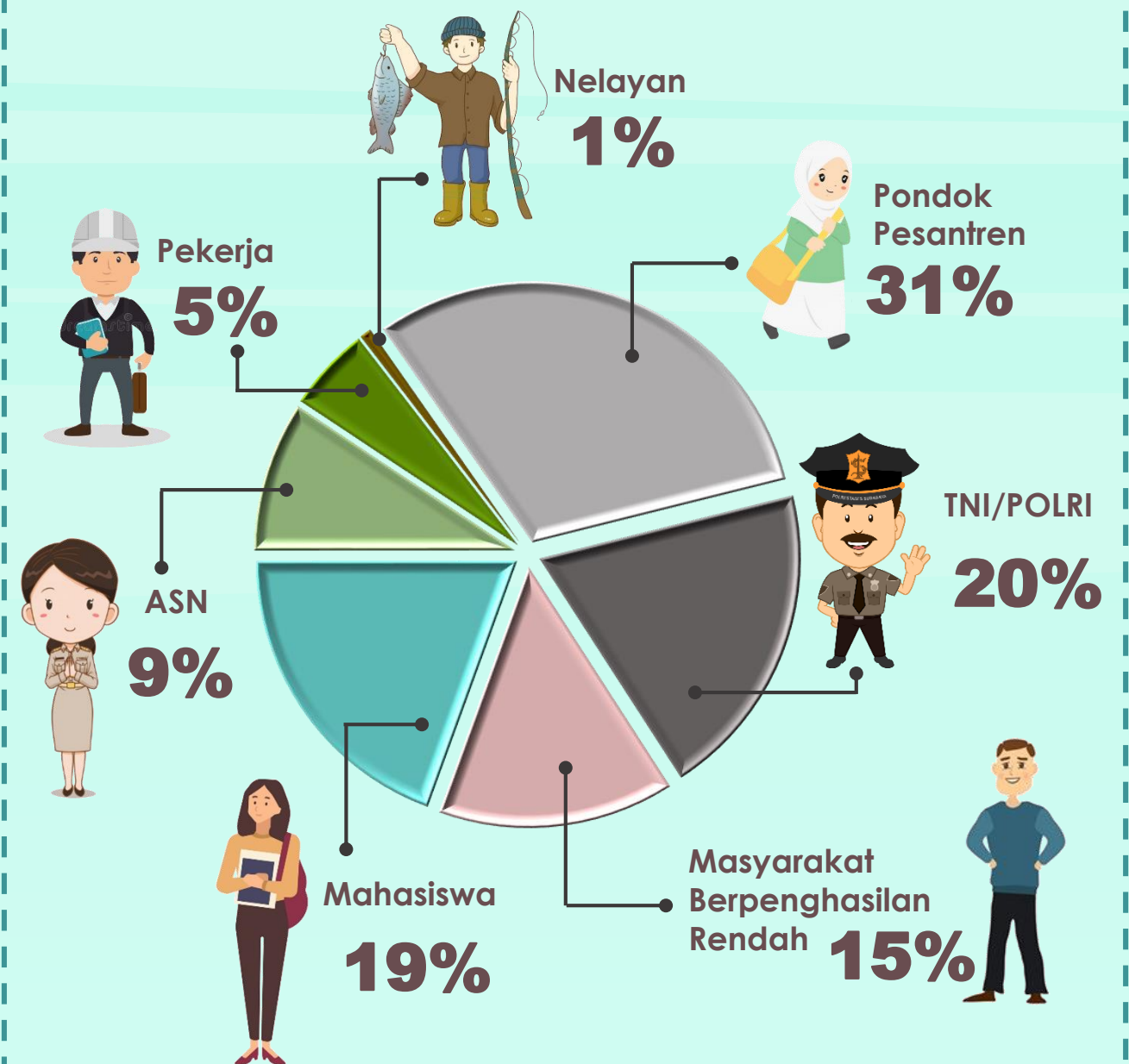
23,9 ribu
Rumah Khusus

RUMAH SUSUN

Pembangunan Rumah Susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan permukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan Rumah Susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega.



Komposisi Penerima Manfaat Rumah Susun



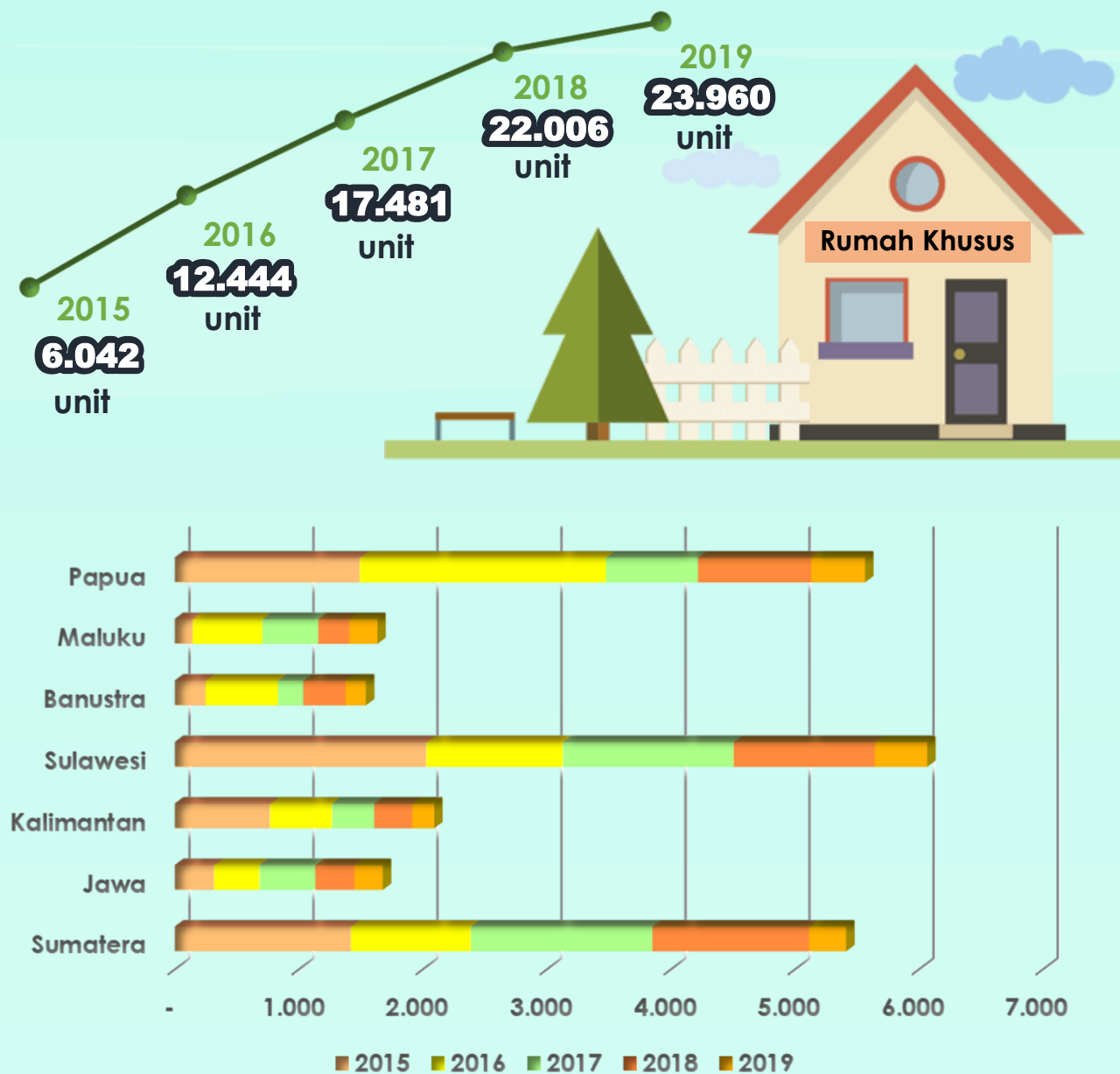
Status Data : 25 September 2020

Sumber Data : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

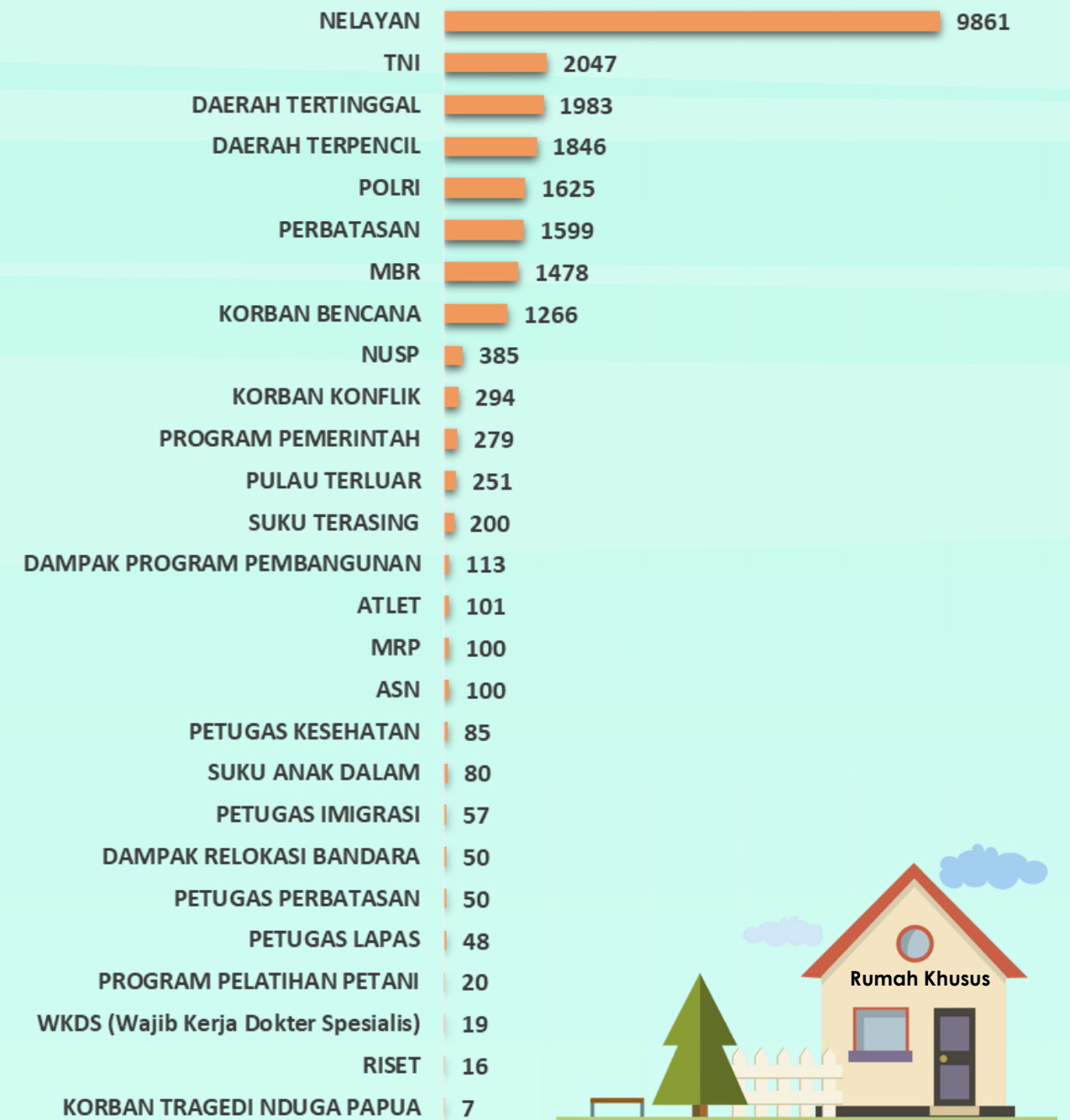
RUMAH KHUSUS

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa, rumah khusus merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah peruntukan pembangunan rumah tersebut, seperti rumah untuk korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, tokoh, Polri, TNI, dan lainnya.



Komposisi Penerima Manfaat Rumah Khusus



Status Data : 25 September 2020

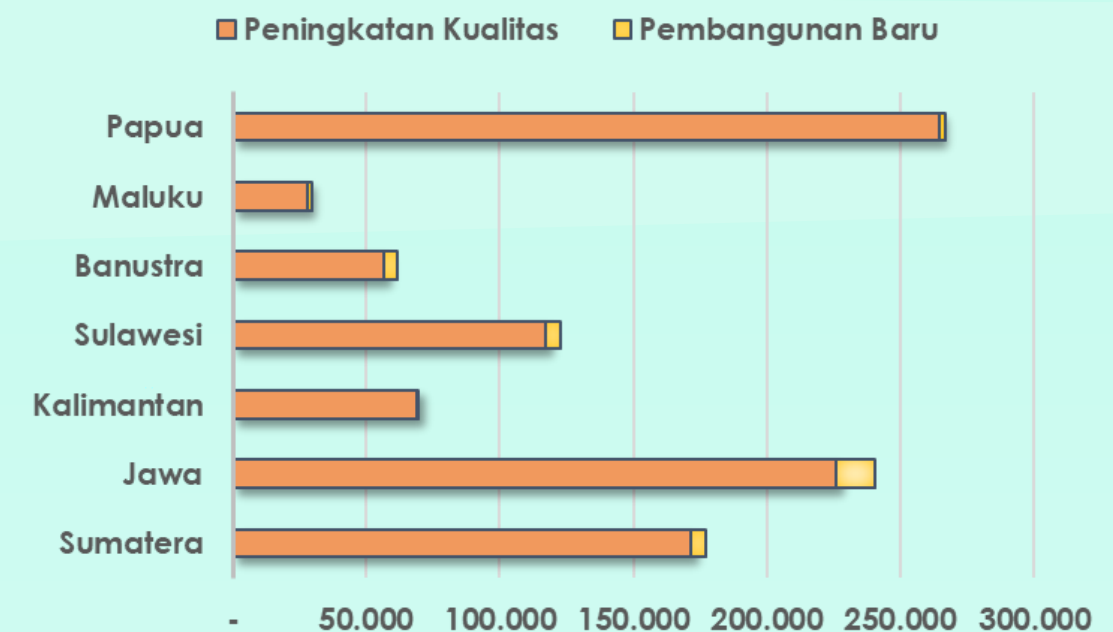
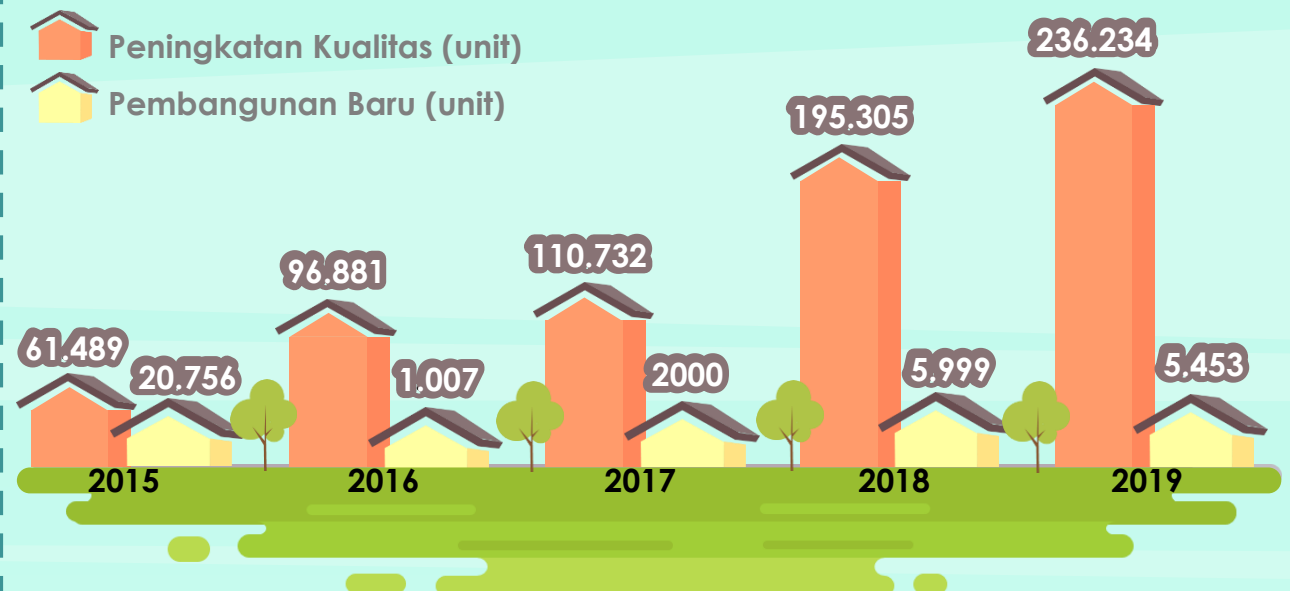
Sumber Data : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Kegiatan pembangunan rumah secara swadaya seringkali belum memenuhi kualitas rumah layak huni seperti sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai. BSPS diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Sasaran BSPS adalah rumah tidak layak huni yang merupakan tanah milik sendiri, bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat atau terkena konsolidasi tanah, relokasi dalam rangka peningkatan perumahan dan permukiman kumuh, rumah yang terkena bencana, kerusakan sosial atau kebakaran. Kategori rumah tidak layak huni yang menjadi target kegiatan BSPS adalah sebagai berikut:

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV,
2. Bahan dinding berupa bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV,
3. Tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan,
4. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh,
5. Rusak berat dan atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi

Realisasi BSPS



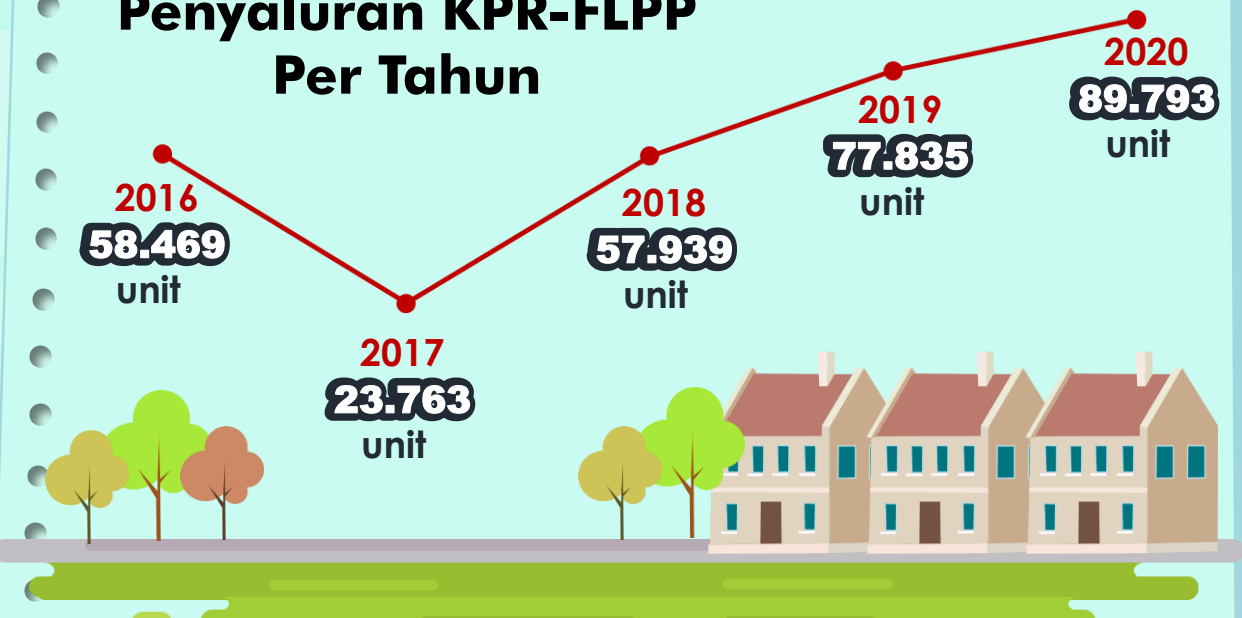
Status Data : 25 September 2020

Sumber Data : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

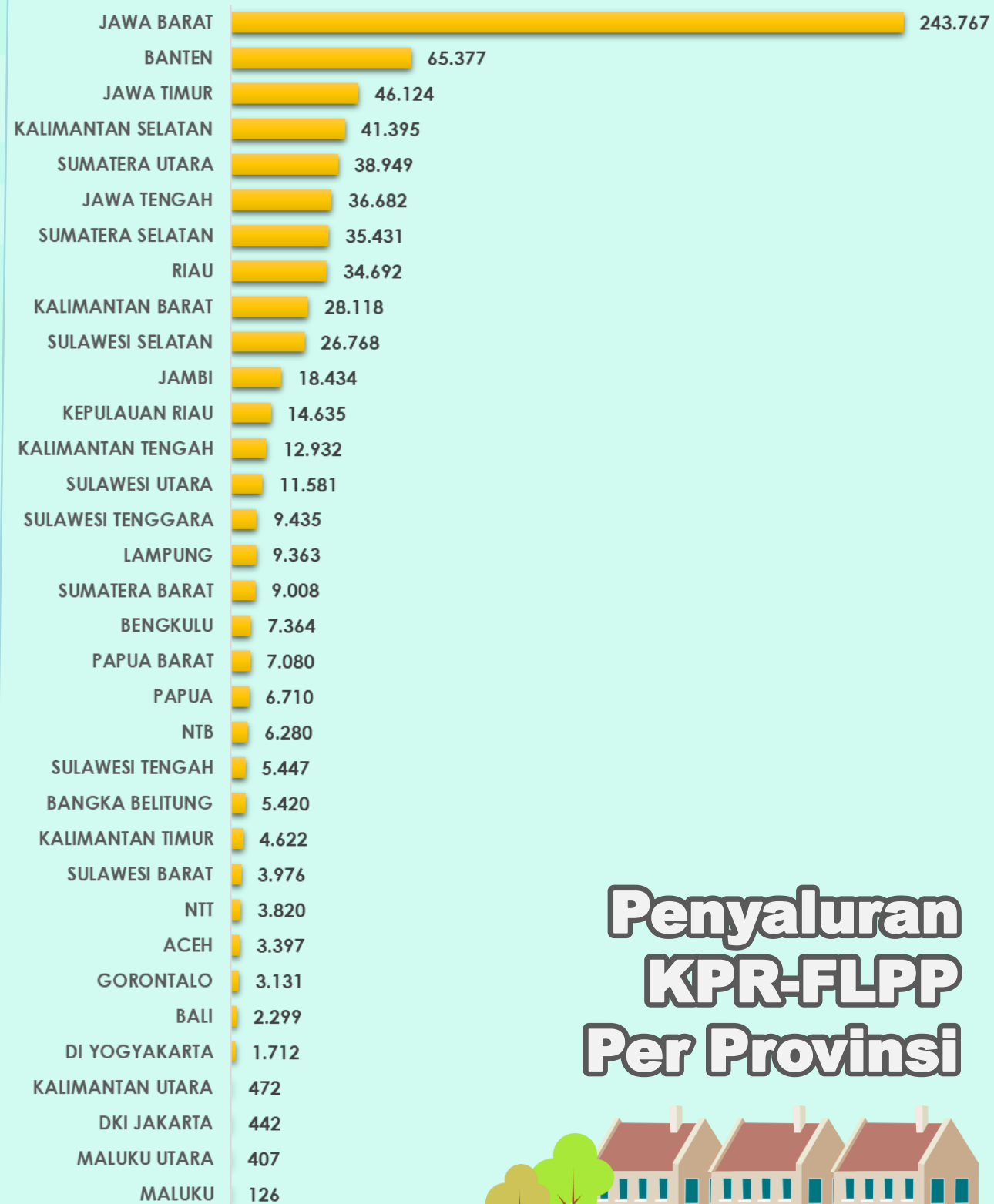
PENYALURAN KPR-FLPP

Dalam upaya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, pemerintah tak hanya mengeluarkan program pembangunan secara fisik, ada pula program bantuan pembiayaan pembelian rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah. Program tersebut adalah **Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)** yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

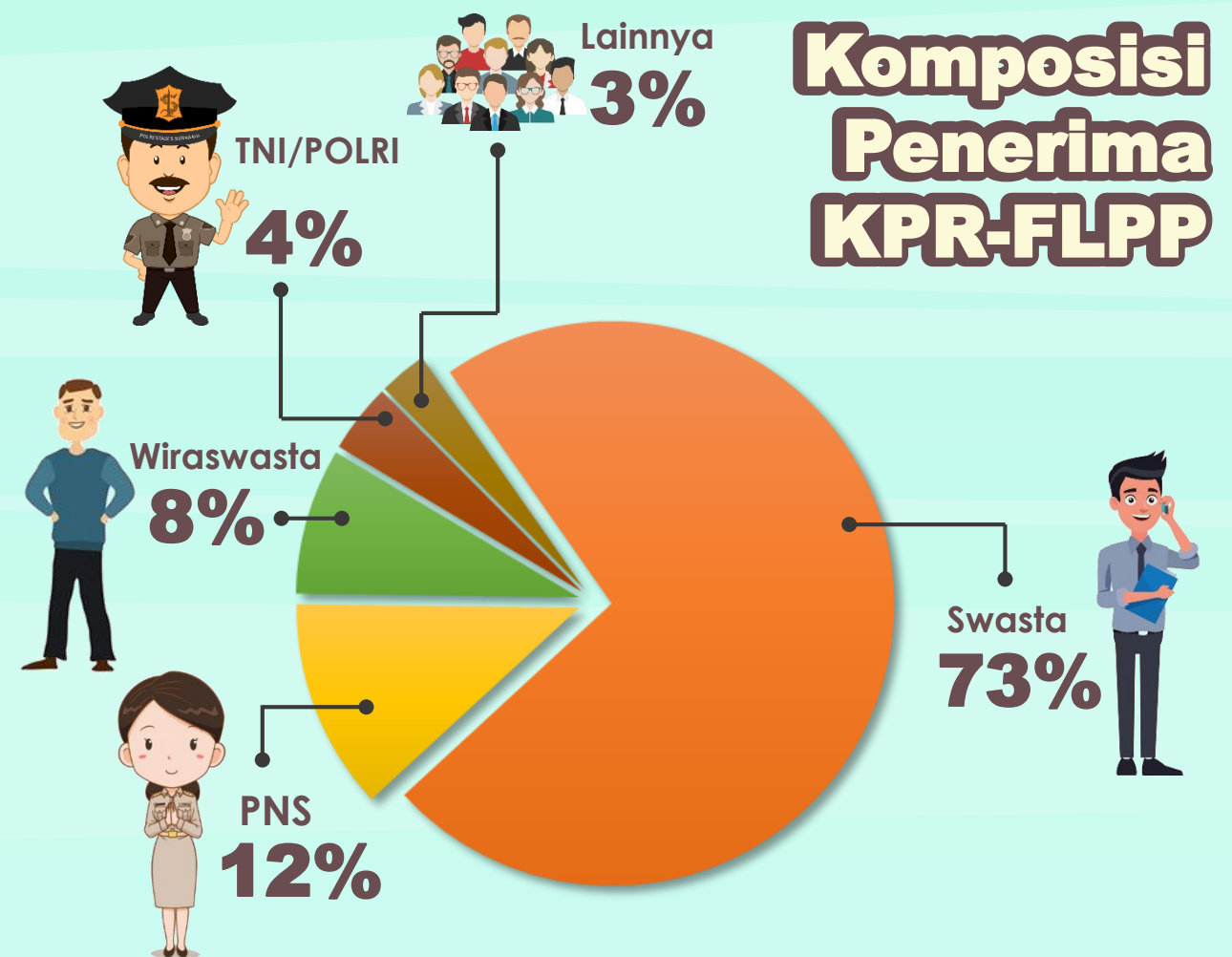
Penyaluran KPR-FLPP Per Tahun



Realisasi penyaluran KPR-FLPP mengalami Fluktuasi dari tahun 2016 hingga September 2020. Pada Tahun 2017, penyaluran FLPP mengalami penurunan hingga 59%, hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran FLPP dari pagu yang ditetapkan pada tahun 2017 dan dialokasikan menjadi anggaran untuk Bantuan Subsidi Selisih Bunga. sedangkan dari 2017 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, hingga September 2020 realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 89.793 unit dan masih akan mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2020.



Penyaluran KPR-FLPP Per Provinsi



Status Data : 11 September 2020

Sumber Data : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Penerima KPR-FLPP terbanyak adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja pada swasta yaitu sebesar 73%. sedangkan penerima KPR-FLPP dari golongan ASN yang terdiri dari PNS dan TNI/POLRI masing-masing sebesar 12% dan 4%, angka ini tidak terlalu banyak karena sebagian besar PNS difasilitasi dengan rumah khusus, rumah susun, dan adapula yang mendapatkan fasilitas rumah dinas. Untuk penerima fasilitas KPR-FLPP dari wiraswasta sebesar 8% dan untuk profesi lainnya sebesar 3%.

BINA KONSTRUKSI



Data Dapat Diakses Melalui :



https://data.pu.go.id/search/field_topic/sdm-konstruksi-2

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari kegiatan konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan yang menghasilkan bangunan yang menyatu dengan lahan kedudukannya. Hasil kegiatan konstruksi antara lain, gedung, jalan, jembatan, bangunan air dan drainase, sanitasi, dan lainnya. Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS tahun 2015, kegiatan konstruksi terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Konstruksi Gedung meliputi semua jenis gedung/bangunan, baik pembangunan gedung baru, perbaikan, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara.
2. Konstruksi Bangunan Sipil mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga umum dan lain-lain.
3. Konstruksi Khusus merupakan kegiatan konstruksi yang dilakukan dengan keahlian khusus. Kegiatan konstruksi khusus mencakup penyelesaian gedung, instalasi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan, sistem alarm dan pekerjaan listrik lain, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan, dan lainnya.



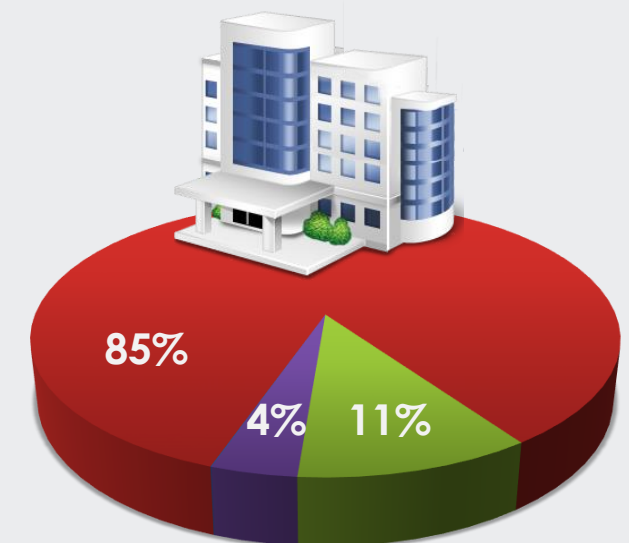
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional yang semakin pesat, banyak perusahaan penyedia jasa konstruksi bermunculan, baik perseorangan atau badan usaha. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan **UU No. 2 Tahun 2017** tentang Jasa Konstruksi, jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Badan usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikasi untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (konsultan) sebagai perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Usaha jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi bersifat umum dan spesialis.

Penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Kualifikasi tersebut dibagi menjadi 4 yaitu, perorangan, kecil, menengah, dan besar.

Sebagian besar badan usaha jasa konsultan terqualifikasi sebagai badan usaha kecil terdapat sebesar **85%**. Kualifikasi menengah terdapat sebesar **11,02%**. Kualifikasi lainnya yaitu besar dan perorangan sebesar **4,05%**.



■ Badan Usaha Kecil
■ Badan Usaha Menengah
■ Badan Usaha Besar

Status Data : 02 September 2020
Sumber Data : report.lpjk.net

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi terbagi menjadi 2 yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil.

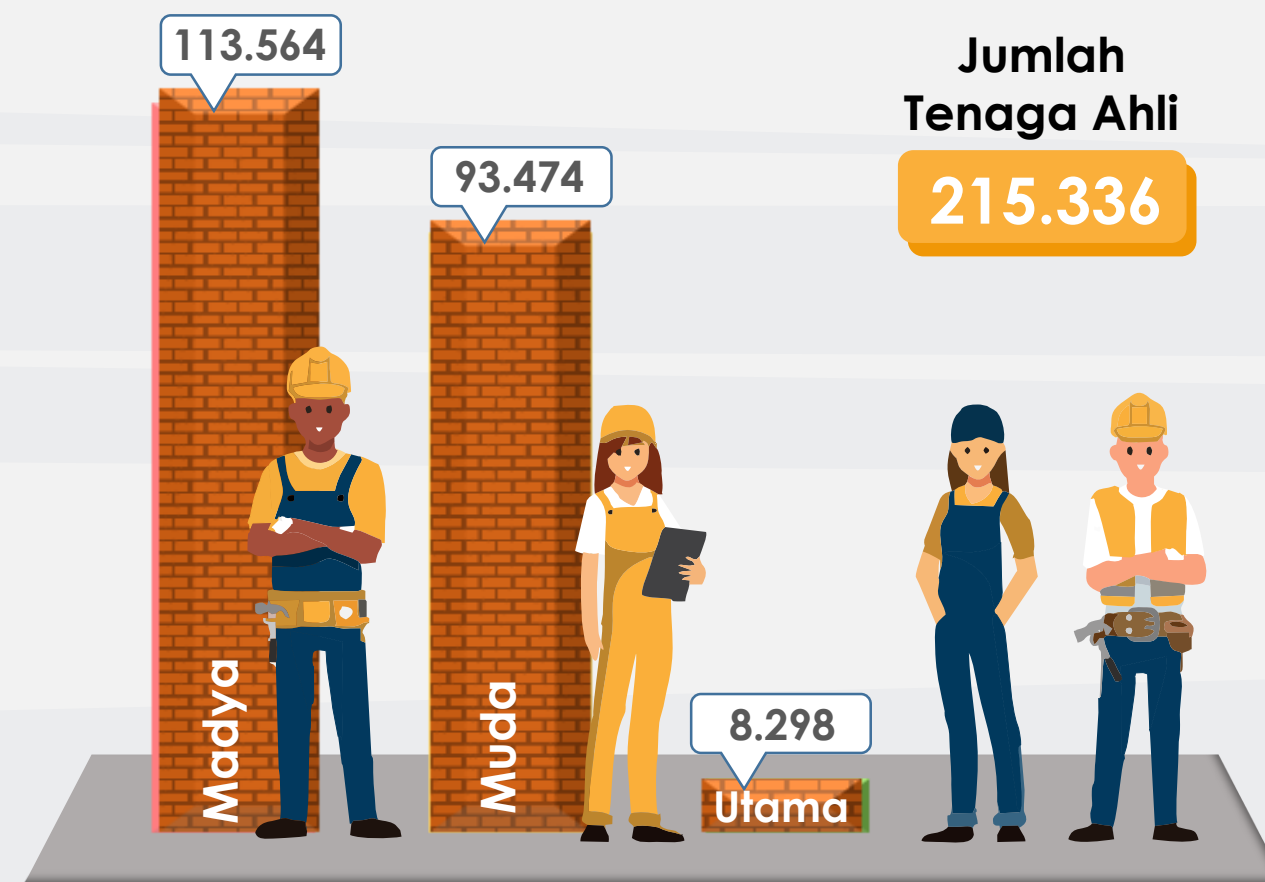


Kualifikasi tenaga ahli yaitu muda, madya, dan utama. Tenaga ahli yang sudah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkatkan menjadi ahli utama. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013 persyaratan khusus kualifikasi tenaga ahli adalah sebagai berikut:

- Utama : minimal D4 dengan pengalaman minimal 6 tahun lulusan S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun, atau S1 Terapan dengan pengalaman minimal 4 tahun.
- Madya : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 3 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.
- Muda : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 1 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.



KOMPOSISI TENAGA AHLI BERDASARKAN KUALIFIKASI



Tenaga ahli bersertifikat keahlian merupakan salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi SBU bidang jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3), dan ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

Berdasarkan informasi dari sumber data, terdapat 215.336 orang tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi. Persentase Tenaga Ahli Madya sebesar 52,73%. Sedangkan tenaga ahli muda dan utama masing-masing memiliki persentase sebesar 43,41% dan 3,85%.

KOMPOSISI TENAGA TERAMPIL BERDASARKAN KUALIFIKASI

Kualifikasi tenaga terampil yaitu kelas III, kelas II, dan kelas I. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013 persyaratan khusus kualifikasi tenaga terampil adalah sebagai berikut:

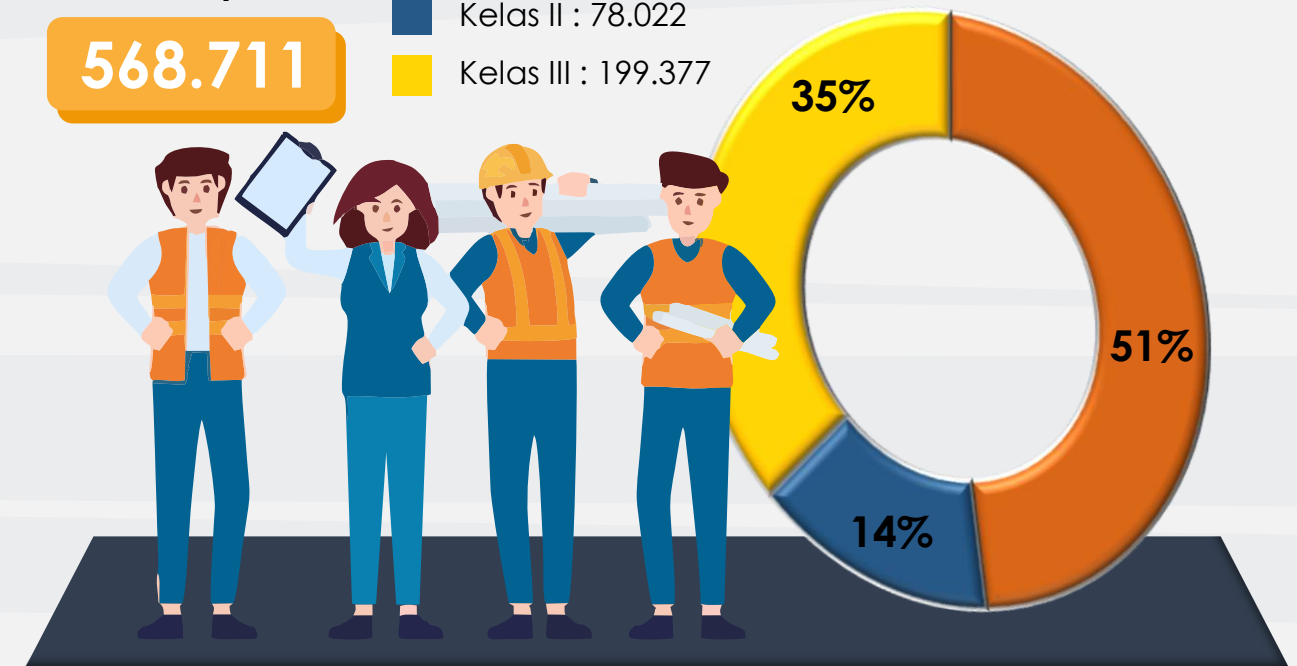
- Kelas I : minimal lulusan D1 dengan pengalaman minimal 3 tahun.
- Kelas II : minimal lulusan SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun atau SLTA dengan pengalaman minimal 3 tahun.
- Kelas III : minimal lulusan SD dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SLTP dengan pengalaman minimal 2 tahun.

Sertifikat Keterampilan (SKT) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keterampilan tertentu. Setiap badan usaha jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3) yang akan mengajukan permohonan sertifikat dan registrasi badan usaha harus memiliki tenaga kerja terampil bersertifikat, sebagai persyaratan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).

Jumlah Tenaga Terampil

568.711

- Kelas I : 291.312
- Kelas II : 78.022
- Kelas III : 199.377



Status Data : 02 September 2020
Sumber Data : report.lpjk.net

Indonesia memiliki **568.711** tenaga kerja bersertifikat keterampilan. Tenaga terampil dengan SKT Kelas I sebesar **51%**. Sedangkan persentase kelas II dan kelas III sebesar **14%** dan **35%**.

SUMBER DAYA MANUSIA



Data Dapat Diakses Melalui :



https://data.pu.go.id/search/field_topic/sdm-konstruksi-2

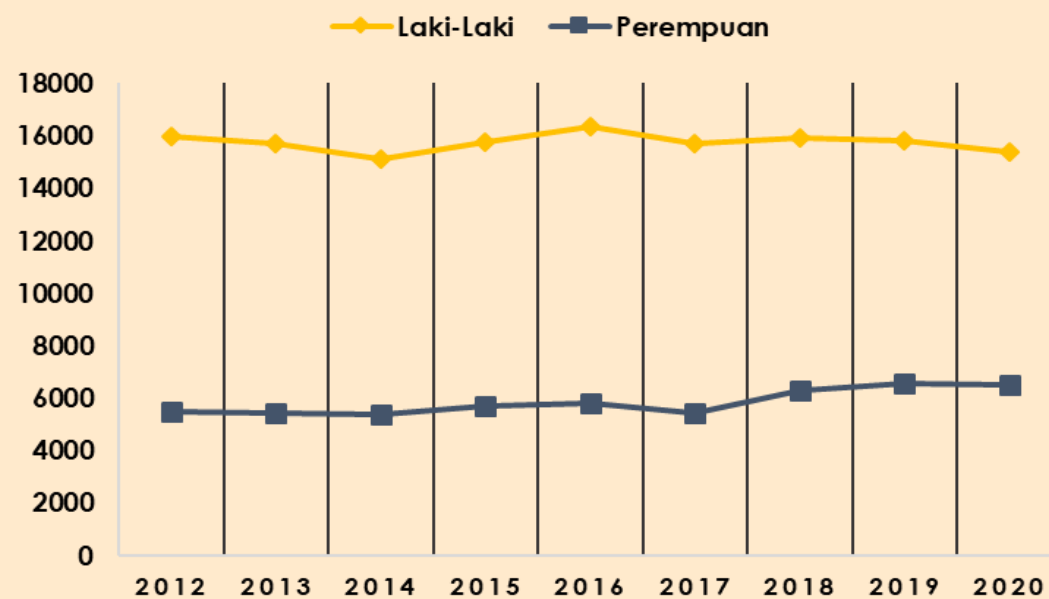
SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN PUPR

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Peran penting SDM dalam pembangunan infrastruktur adalah sebagai perancang, penyusun, pelaksana, serta pengawas. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM Kementerian PUPR dirasa perlu dilakukan guna menunjang pembangunan infrastruktur. Jumlah pegawai Kementerian PUPR mengalami fluktuasi tiap tahunnya.

Perkembangan jumlah pegawai kementerian PUPR tahun 2012 – 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 - 2016 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dalam Perpres tersebut ditetapkan penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Sehingga terjadi peningkatan jumlah pegawai. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan dikarenakan adanya rekrutmen CPNS pada tahun 2017 dan tahun 2018.

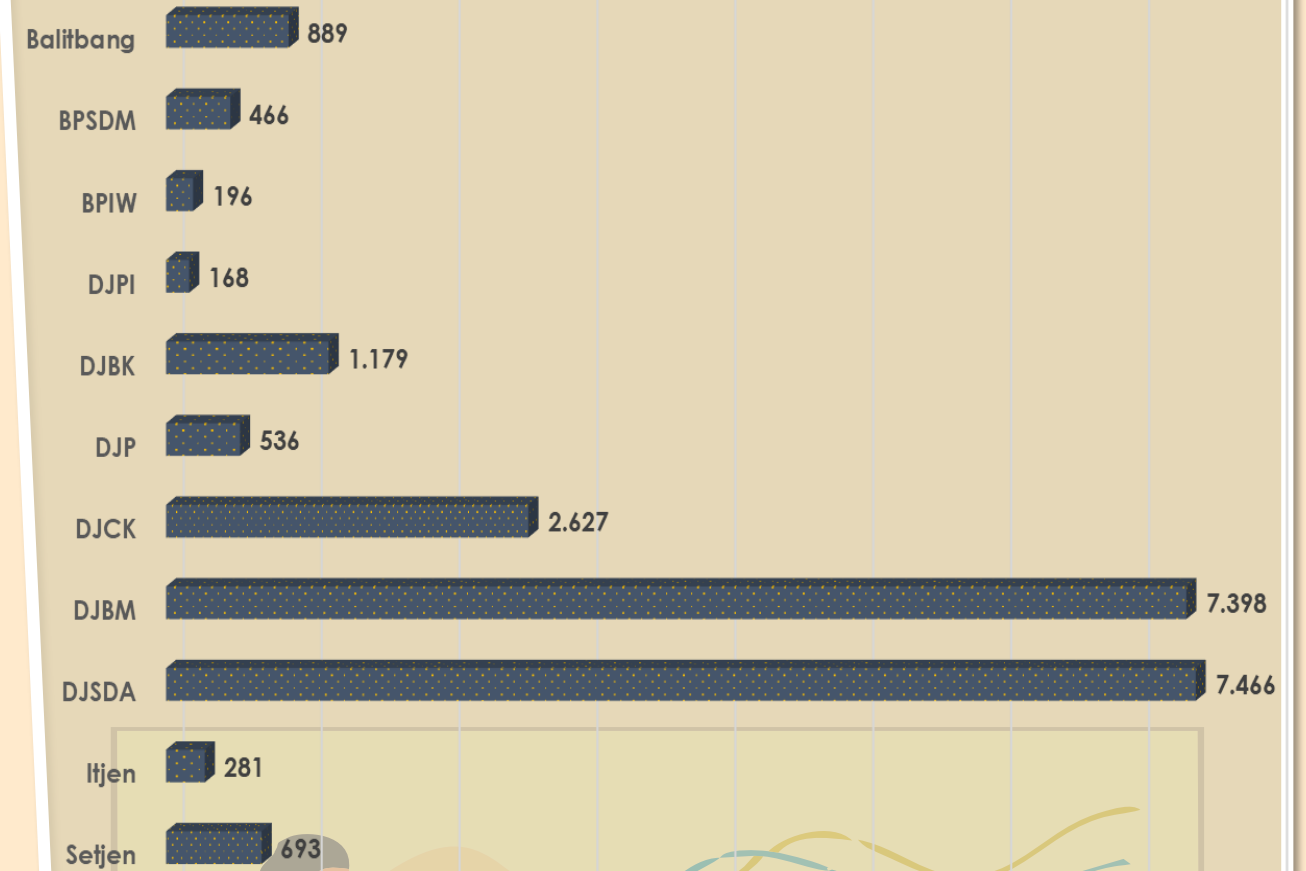
Perkembangan Jumlah Pegawai PUPR Tahun 2012-2020



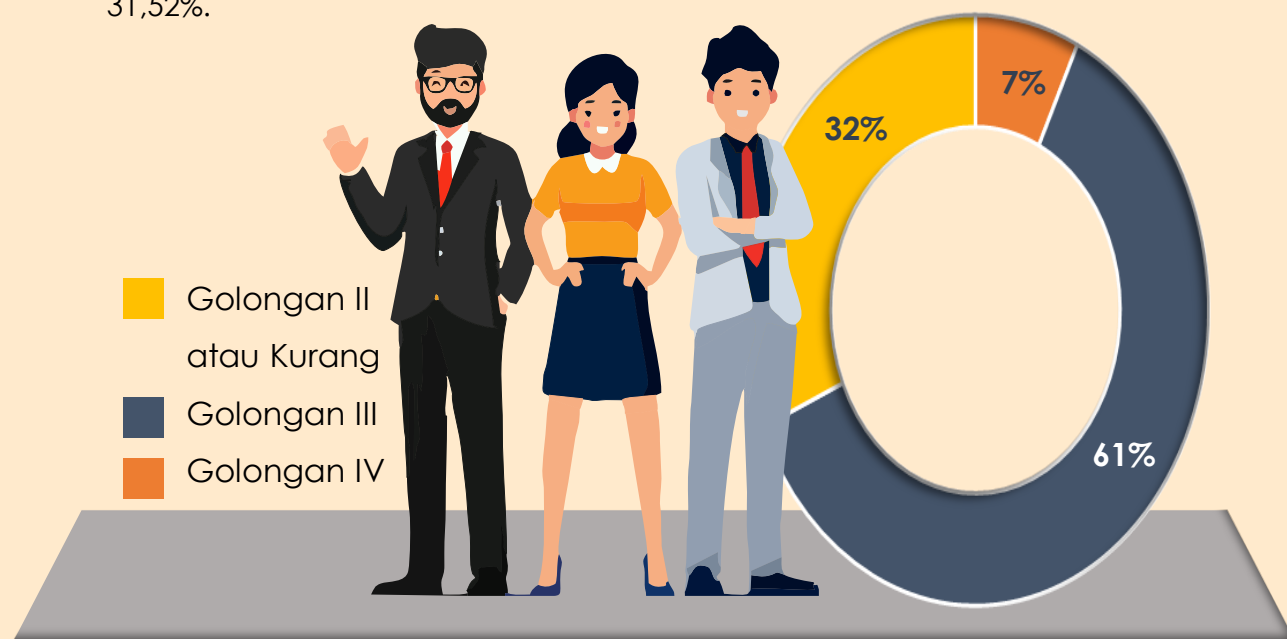
Status Data : 16 Juli 2020
Sumber Data : Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Total jumlah SDM pada tahun 2020 sebanyak 21.899 pegawai. Kementerian PUPR memiliki 11 unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki jumlah pegawai terbanyak adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 34,09% dari keseluruhan jumlah pegawai Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Bina Marga menempati posisi kedua dengan persentase jumlah pegawai mencapai 33,78%.

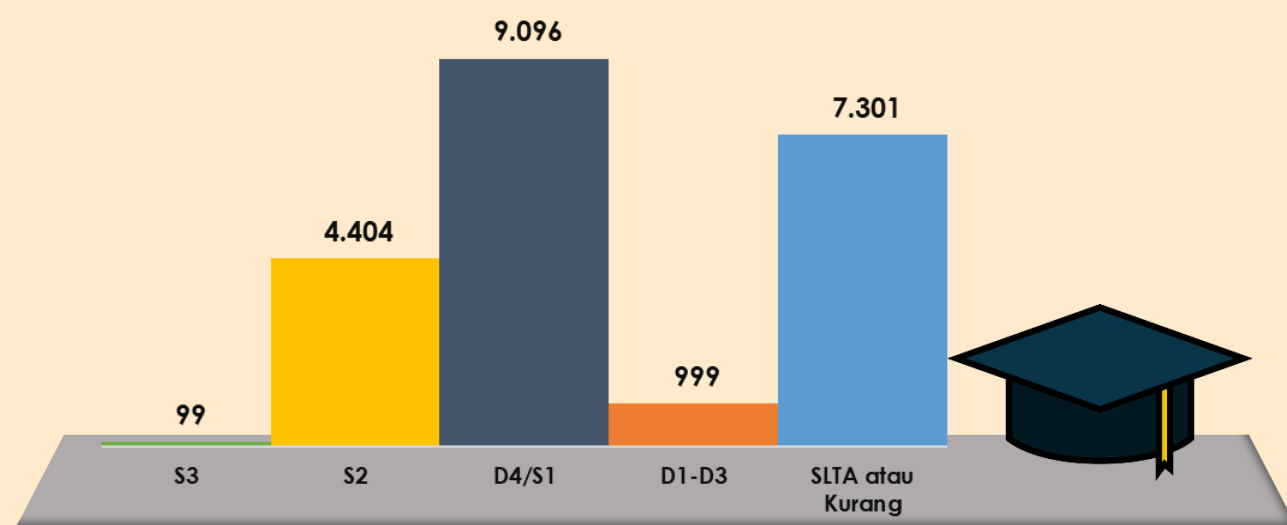
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Organisasi



Dilihat dari golongan kepangkatan, jumlah pegawai kementerian PUPR tahun 2019 golongan IV terdapat 1.578 pegawai atau sebesar 7,21% Pegawai dengan golongan III sebanyak 13.419 pegawai atau sebesar 61,28%. Pada golongan II dan kurang terdapat 6.902 pegawai atau sebesar 31,52%.



Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Kementerian PUPR dengan pendidikan SMA ke bawah sebanyak **7.301 pegawai** atau sebesar **33,34%**. Pegawai yang lulus dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak **9.096 pegawai** atau sebesar **14,45%** yang artinya pegawai kementerian PUPR paling banyak berpendidikan terakhir S1. Sebanyak **4.503 pegawai** atau sebesar **20,56%** pegawai Kementerian PUPR merupakan lulusan S2 dan S3. Kemudian **4,56%** atau **999 pegawai** lainnya merupakan lulusan diploma.



Status Data : 16 Juli 2020
Sumber Data : Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lanjut usia, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus. Bila hasil pembangunan belum dirasakan manfaatnya oleh setiap lapisan masyarakat, hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan.

Gender merupakan perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sementara Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

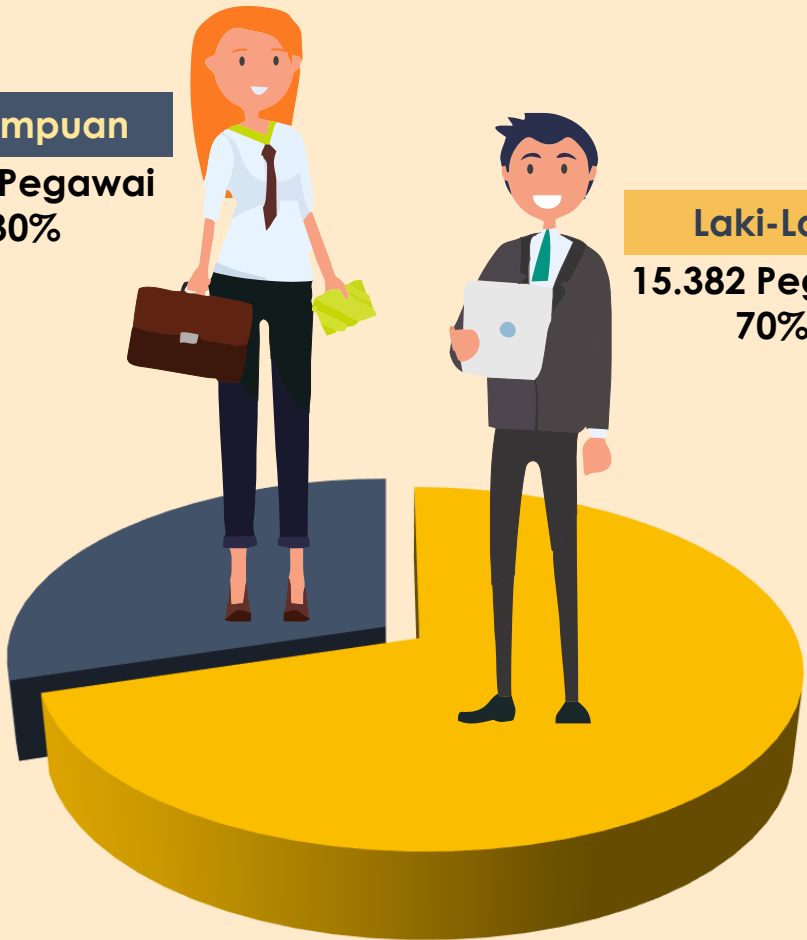
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerataan pembangunan sesuai dengan **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000** tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional. Pemerataan pembangunan tersebut tercipta apabila masyarakat memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama. Secara umum PUG bukan merupakan konsep untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan saja, namun mengakomodasi seluruh kebutuhan semua gender, baik laki-laki, perempuan, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak-anak dan difabel. Formulasi mekanisme kebijakan yang tepat perlu dirancang, agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat.

Sesuai dengan salah satu strategi dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR, pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen Kementerian PUPR yang akan diterapkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat dilihat dari jumlah pegawai perempuan di Kementerian PUPR. Secara umum pegawai Kementerian PUPR didominasi pegawai laki-laki, yaitu sebesar 70,24%. Sedangkan pegawai perempuan sebesar 29,76%. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki, namun hal tersebut tidak menutup kesempatan untuk dapat berkiprah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Perbandingan Pegawai Laki-Laki dan Pegawai Perempuan di PUPR

Perempuan
6.517 Pegawai
30%

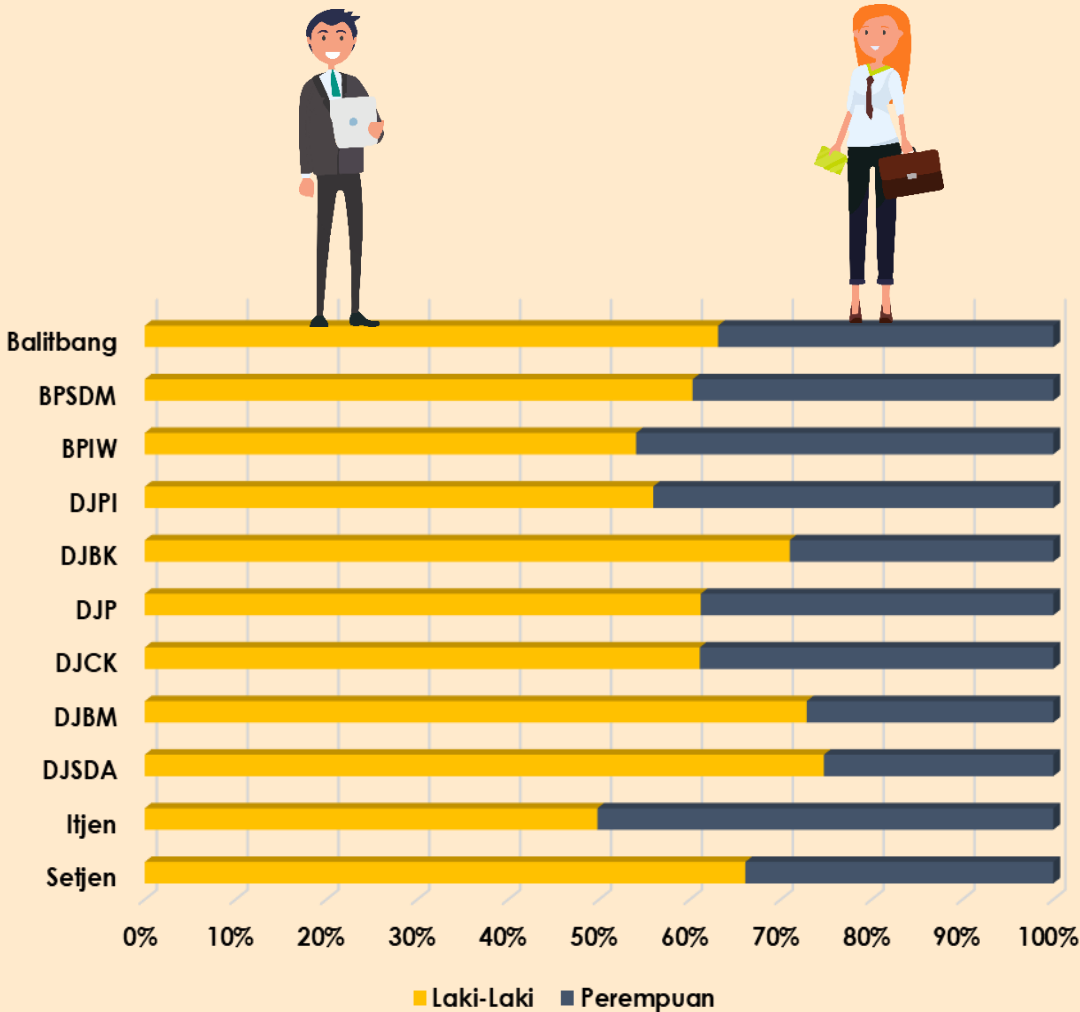


Laki-Laki
15.382 Pegawai
70%

Status Data : 16 Juli 2020
Sumber Data : Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Dari total keseluruhan jumlah pegawai, jumlah pegawai perempuan terbanyak terdapat pada Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu sebanyak 2.007 pegawai, kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebanyak 1.885 pegawai, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebanyak 1.022 pegawai. Sedangkan untuk jumlah pegawai laki-laki terbanyak berada pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yaitu sebanyak 5.581 pegawai, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 5.391 pegawai, Direktorat Jenderal Cipta Karya 1.605 pegawai.

Perbandingan Pegawai Laki-Laki dan Pegawai Perempuan di PUPR



Penutup

Buku tahunan ini dibuat dengan struktur sesuai ketersediaan data infrastruktur walidatanya, format data agregat menurut provinsi dan juga dapat berbeda dalam hal penekanan informasi mengenai objek hasil pembangunan infrastruktur ke-PUPR-an beserta beberapa dokumentasinya, selain itu juga terjadi perubahan nomenklatur pada struktur organisasi yang menjadikan data tersebut dapat mengalami perubahan seperti pada perubahan nama Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rintisan nama Buku Informasi Statistik per tahun seperti berikut:

2006 : Buku Induk Kestatistikan
2007 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2008 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2009 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2010 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2011 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2012 : Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum
2013 : Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum
2014 : Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum
2015 : Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2016 : Buku Induk Statistik
2017 : Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2018 : Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2019 : Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka menyebarluaskan data dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan. Serta diharapkan dapat melengkapi dan memberikan data dan informasi bidang PUPR tingkat nasional dalam sajian yang lebih mudah.

Pusdatin telah berupaya maksimal dalam menyediakan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pengembangan sistem informasi guna mendukung manajemen Kementerian PUPR untuk tingkat nasional secara lengkap. Namun demikian, upaya tersebut masih dirasakan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang senantiasa dinamis keragaman jenisnya dan meningkat jumlah pengguna informasinya.

Dengan diterbitkannya Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat memberi manfaat tak hanya bagi pimpinan di lingkungan PUPR namun juga untuk masyarakat luas pada umumnya. Selain itu peningkatan kerjasama antar unit organisasi dapat ditingkatkan, sehingga pertukaran data dan informasi berjalan secara mutual dan dapat saling melengkapi untuk dapat dilakukan sebagai masukan kegiatan dan menghasilkan produk yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan nasional.